

Cirebon
Katon
Edisi khusus



**Kopi
Pagi**

Kang Luthfi



KOPI
PAGI
Kang Luthfi



Mohamad Luthfi

KOPI PAGI Kang Luthfi

Penulis: **Mohamad Luthfi**
Editor: **Supriyatno Yudi**
Desain & Ilustrasi: **Boyke Datu**

Copyright @2023
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
All Right Reserved

Cetakan Pertama Desember, 2023
ISBN: 978-623-98308-0-9

Diterbitkan oleh:
DipaTera atas kerjasama dengan
Majalah Cirebon Katon

Perpustakaan Nasional RI
Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Kopi Pagi Kang Luthfi, Cet-1, Cirebon, 2023
VII + 172 halaman

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirahim, dengan menyebut nama Allah penulis berserah diri, bertawakkal, dan menyandarkan penulisan buku ini kepada-Nya. Sesungguhnya penulis tidak mengetahui apa-apa kecuali dengan rahmat dan taufiq-Nya. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah

yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon, keluarga, sahabat, sejawat, dan semua pihak yang telah membantu hadirnya buku ini ke hadapan pembaca.



Mohamad Luthfi

Buku ini merupakan refleksi atas berbagai persoalan yang ada dan dijumpai penulis di Kabupaten Cirebon, terutama saat menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Refleksi atas deretan masalah ini tentu saja dalam kerangka mengajak semua pihak untuk saling membahu membangun Cirebon.

Tentu saja kompleksitas masalah yang dihadapi tidak akan selesai dengan refleksi dan tawaran solusi di buku ini yang sangat terbatas. Untaian dalam buku ini hanya sekadar pemantik untuk kita bersama lebih jauh berdiskusi memikirkan dan beraksi menyelesaikan berbagai masalah di Kabupaten Cirebon.

Selain itu, kami yakin bahwa pada kenyataannya kompleksitas masalah yang ada jauh lebih banyak dan rumit dibanding dengan yang ditulis di buku ini. Masih banyak masalah lain yang belum sempat diuraikan dalam buku

ini. Untuk ini, penulis sangat terbuka untuk sama-sama 'belanja masalah', kemudian berembuk merumuskan penyelesaian, dan gotong royong bertindak menyelesaikan berbagai masalah tersebut.

Tanpa bermaksud menyederhanakan persoalan, buku ini mencoba mengemas berbagai masalah itu dengan bahasa yang ringan dan renyah, dengan harapan dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. Selamat menikmati Kopi Pagi, selamat menyambut Cirebon Bahagia.

Penulis

Mohamad Luthfi



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	III
Negeri Empal Gentong	8
Tua Dalam Ketertinggalan	12
Visi Bobadan vs Visi Beneran	16
Internalisasi	22
Tolok Ukur	26
Kopi Tubruk	30
Kopi Lanang	34
Dewan	38
Mental Pariwisata	42
Glagepan	46
Mantan	50
Gambit Menteri	54
Kookboek	58
Dawa Buntute	62
Parkir Bus	66
Glatikan	70
Buta Data Desa	74
Tol Pelayanan	78
Sportif	82

Rasa Kota, Rasa Desa	86
Laron, Apa Lebah?	90
Mencari Ruang Keseriusan	94
Kalah Garam	98
Rasa Wisata	102
Membelakangi Laut	106
Merdeka Sing Corona	110
Nyate Bro	114
Haji Udin Vs	118
Haji Belanda	118
Musyawaharah Ketupat	122
Jalan Air	126
Sedang-sedang Saja	130
Kera Juga Bekerja	134
Laron Akhir Tahun	138
Pahlawan	142
Lampu Kuning	142
Bagai Kepompong	146
Masker	150
Merdeka	154
Akun Palsu	158
Tempat Sampah	162
Ujian Gotong Royong	166



Negeri Empal Gentong

Sering kami mendapat kunjungan dari DPRD kabupaten/kota lain. Di sela obrolan serius, biasanya selalu kami sisipkan perbincangan ringan seputar kuliner Cirebon. Promosi lah begitu. Suatu ketika ada tamu yang cukup kritis, dia bertanya:

Pak kenapa masakan yang seperti gulai di Cirebon itu namanya empal gentong? Bukankah empal itu daging sapi yang diiris tipis lalu digoreng?"

Wajar sih orang bertanya seperti itu. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga mendefinisikan empal seperti

itu. Tapi sebagai tuan rumah kita harus siap dengan pertanyaan kritis, terlebih pertanyaan terhadap kekhasan daerah.

Kami jelaskan bahwa empal itu adalah daging yang empuk. Nah, nama di belakangnya merujuk pada proses atau metode pengem-

Ini dia yang
bikin kuat
dan bermartabat



**Semua akan mumpuni
di negeri empal gentong**



pukan daging. Di daerah lain ada *empal gepuk*. Wujudnya daging sapi goreng. Metode pengempukannya dengan di-*gepuk* (ditumbuk atau dipukul dengan benda tumpul). Jadilah namanya empal gepuk.

Sedangkan di Cirebon, daging diempukkan dengan cara direbus di dalam gentong selama bebe-rapa jam. Untuk itulah namanya empal gentong. Di Cirebon yang diempukkan bukan hanya daging, tapi juga kikil, jeroan dan kepala.

Menariknya, empal gentong sudah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh Pemerintah Jawa Barat, pada 2 Februari 2022. Sementara, di pemerintah pusat, sejak Januari 2016, statusnya baru tercatat sebagai WBTB, belum ditetapkan sebagai WBTB.

Nah, silakan kalau sebelumnya menikmati empal gentong hanya sebagai kuli-

neran; sekarang nikmatilah empal gentong sebagai sajian warisan budaya. Adakah perbedaan rasa?

Kalau belum ada bedanya, mari saya tambahkan narasi penambah kelezatannya. Empal gentong konon berdasarkan cerita rakyat sudah ada sejak tahun 1400-an, atau abad ke-15.

Sebagai pusat perdagangan kala itu, pelabuhan Cirebon adalah tempat bertemunya para saudagar dari Arab, Cina, India, Jawa, dan lokal Cirebon. Empal gentong adalah representasi gabungan masakan atau bumbu dari kelima budaya itu.

Karena lahir dari peradaban yang cukup tua, empal gentong pun sarat filosofi. Daging yang empuk diibaratkan sebagai manusia. Bahwa manusia adalah seonggok daging yang lemah tanpa daya. Untuk itu manusia tak perlu sombong.

Seonggok daging itu

memiliki rasa ketika disajikan dengan kuah bumbu. Begitupun manusia, dia akan bermartabat ketika dalam kehidupannya me-ngusung nilai sosial, budaya, dan agama. Jadi, bumbu ini pengibaratan nilai yang harus menyelimuti bahkan terserap di dalam diri manusia.

Semakin bumbu itu meresap ke dalam daging, rasa empal gentong semakin enak. Manusia pun begitu, semakin nilai menginternalisasi dan diamalkan dia semakin bermartabat.

Sedangkan gentong adalah pengibaratan dari aturan kerajaan, negara, atau pemerintah. Kumpulan manusia harus taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku di sebuah pemerintahan. Jika tidak, maka akan terjadi kekacauan.

Daging tidak akan empuk, jika di luar gentong. Jika ada sebagian di dalam gentong dan sebagian di luar gentong

maka akan terjadi kekacauan rasa, yang satu empuk yang lainnya alot. Lebih parah lagi, jika gentong itu pecah, maka tidak akan daging itu menjadi masakan bernama empal gentong.

Pelajarannya, manusia harus taat dengan aturan pemerintah. Jika tidak, maka akan terjadi kekacauan keamanan dan ketertiban. Konsekuensi terburuknya, negara itu bisa bubar.

Sahabat, mari kita nikmati empal gentong sebagai warisan budaya dan melestarikannya. Oh ya jangan lupa, ketika menikmatinya sadarlah tentang diri yang lemah dan pentingnya mengusung nilai dan menjadi pribadi yang taat.

Mari kita jadi Kabupaten Cirebon, dan Indonesia, menjadi negeri yang bermartabat, seperti halnya negeri empal gentong.



Tua Dalam Ketertinggalan

Kita sering mendengar adagium: menjadi tua itu kepastian, sedangkan menjadi dewasa itu pilihan. Tentu itu sebuah kewajaran dan bisa diterima secara nalar. Lantas bagaimana jika ada ungkapan: menjadi tua itu pilihan, dan menjadi maju itu kesulitan. Apakah ini juga sebuah kewajaran, atau justru sebuah keanehan?

Sekilas tentu aneh, kok bisa 'menjadi tua itu pilihan'. Namun, jika Anda melihat dinamika penentuan hari lahir Kabupaten Cirebon (dan Kota Cirebon) itu menjadi tidak aneh. Bisa memilih kapanpun, dan tentu saja dengan alasan atau dasar sebagai pelengkap.

Kabupaten Cirebon memilih peringatan lahir pada 2 April 1482. Bandingkan dengan Kota Cirebon yang memilih peringatan hari lahir pada 31 Desember 1388. Kota Cirebon memang jadi lebih tua. Namun dari sisi angka, ultah Kabupaten Cirebon yang ke-539 juga bukan angka



**Berbanggalah
pada prestasi,
bukan banyak-
banyak umur**



yang muda.

Dibandingkan dengan kabupaten/kota di Jawa Barat, Kabupaten Cirebon termasuk kabupaten tertua kedua (setelah Kota Cirebon). Kabupaten Cirebon seumuran dengan Kota dan Kabupaten Bogor yang lahir pada 3 Juni 1482. Sedangkan yang paling muda adalah Kabupaten Pangandaran, pada 25 Oktober 2012.

Melihat deretan angka lahir kabupaten/kota di Jawa Barat, maka Kabupaten Cirebon memilih (atau memang sebenarnya) berumur tua. Kenapa memilih? Karena masih menjadi polemik dan diskursus kesejarahan. Kabupaten dan Kota Cirebon tidak kompak, sekandung tapi beda hari lahir. Berbeda dengan Kabupaten dan Kota Bogor yang hari lahir-nya sama.

Sebagai kabupaten tua, bagaimana dengan pencapaian Cirebon? Berbanding luruskah dengan usianya?

Beberapa angka statistik menunjukkan bahwa Kabupaten Cirebon cukup terbelakang dibanding kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat.

Pada 2019, angka pengangguran tertinggi se-Jawa Barat, mencapai 10,35 persen. Setelah pandemi (pada 2020) merosot tajam menjadi 11,52 persen. Angka ini jauh di atas angka kemiskinan Jabar (10,46 persen), dan nasional (7,07 persen). Jika angkatan kerja di Kabupaten Cirebon 1,6 juta jiwa, maka pengangguran terbuka sebanyak 184.320 orang.

Prosentase kemiskinan di Kabupaten Cirebon masuk lima besar Jabar. Pada 2019, menyentuh angka 9,94 persen, dan pada 2020 merosot tajam di angka 11,24 persen. Lagi-lagi jauh di atas rata-rata kemiskinan di Jabar (7,88 persen) dan nasional (9,78 persen).

Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Cirebon yang hanya Rp 15,3 juta per

orang per tahun. Ini masih di bawah rata-rata PDRB Jabar sebesar Rp 30 juta per orang per tahun.

Jauh jika dibandingkan Karawang yang mencapai Rp 69,5 juta per orang per tahun. Padahal Karawang lebih muda, lahir pada 14 September 1633.

Deretan angka di atas menunjukkan bahwa umur kota/kabupaten tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan dan kemajuan. Maka, ungkapan bahwa 'menjadi tua itu pilihan, dan menjadi maju itu kesulitan' menjadi relevan disini.

Ungkapan itu patut menjadi otokritik, kita tak perlu *baper* atau tersinggung. Cukuplah itu menjadi pelecut semangat untuk membenahi. Cukuplah itu menjadi cermin setiap peringatan hari jadi Kabupaten Cirebon: sudahkah kita semaju usia kita?

Jika kita selalu mendapati angka statistik yang sama di

setiap HUT, maka kita masih berjalan di tempat. Tak perlulah kita berbangga dengan umur daerah. Tak perlulah kita menggelar pesta berlebihan yang menghabiskan uang rakyat.

Rakyat tidak butuh peringatan HUT. Rakyat butuh kado berupa mudahnya mencari pekerjaan, infrastruktur yang baik, kesejahteraan meningkat, pendidikan terjangkau, sampah terkelola dengan baik, dan fasilitas kesehatan memadai.

Rakyat ingin ada terobosan dan upaya-upaya *extra ordinary* untuk mengejar ketertinggalan. Jangan malu belajar pada yang muda. Jika tidak, kita terus tua dalam ketertinggalan.



Visi Bobadan vs Visi Beneran

Dulu saya bertanya pada diri sendiri, bisakah dalam masa jabatan lima tahun seorang kepala daerah mampu membangun daerahnya? Jujur, waktu itu hanya yakin: bisa. Sekarang? Tambah yakin dong. . . . Kok bisa?

Sebenarnya, dalam tiga atau empat tahun setelah menjabat, kinerja seorang kepala daerah akan terlihat: terasa ada perubahan di daerahnya. Sebelum dilanjutkan, silakan sejenak, rasakan-renungkan tentang daerah Anda, bagaimana perubahannya?

Kita lanjutkan dulu ya,

nanti Anda bisa renungkan kembali. Kenapa bisa demikian (dalam tiga-empat tahun ada perubahan)? Mari lihat beberapa contoh saja.

Joko Widodo ketika menjadi Walikota Solo di periode pertama (sekitar tiga atau empat tahun setelah menjabat), sukses membenahi PKL, ter-

**Visi agamis
kok begini,**



**lihat tuh Banyuwangi
visinya beneran...**



Mohamad Luthfi

minal bus, dan mem-branding Solo. Walhasil di pemilihan periode kedua, ia meraup suara 90%, sebelumnya di periode pertama hanya 36,62%.

Hal yang sama juga dialami Tri Rismaharini yang dianggap mampu mengubah wajah Kota Surabaya, dengan membangun taman-taman kota dan mener-tibkan PKL. Sehingga di periode kedua ia mendapat-kan kepercayaan 86,34% suara, sebelumnya hanya 38,53%.

Tak kalah dengan Jokowi dan Risma, yang pa-ling fenomenal adalah Abdullah Azwar Anas dalam memba-ngun Kabupaten Banyuwangi selama dua periode (2010-2020). Ini contoh yang tepat bagi Kabupaten Cirebon, karena sama-sama kabupaten.

Pada saat ia memulai memimpin Banyuwangi di 2010, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (KPPD) Banyuwangi menurut eval-uasi Kemendagri berada di

peringkat 156 dari 395 kabu-paten seluruh Indonesia. Lima tahun (2015) setelah menjabat meningkat di posisi 20, kemu-dian pada 2016 di posisi 16, 2017 di posisi 6, 2018 peringkat 4, dan 2019 peringkat pertama. Luar biasa!

Evaluasi KPPD oleh Ke-mendagri itu dilakukan pada enam urusan pemerintahan: pendidikan, kese-hatan, PUPR, pertanian, pariwisata, hingga pena-nga-nan kemi-skinan. Dari enam indikator tersebut, dirinci lagi menjadi 800 lebih indikator kinerja daerah.

Apakah semua indikator itu dikerjakan Anas? Ia fokus pada pariwisata sebagai penggerak utama pembangu-nan Banyuwangi sejak awal kepemimpinannya. Berbagai bidang disinkronisasikan un-tuk mendukung pengemban-gan pariwisata.

Dinas lainnya, seperti per-tanian, pengairan, pekerjaan umum, serta perindustrian

dan perdagangan harus berjalan di rel yang berujung sama: pariwisata. “Semua dinas adalah dinas pariwisata,” seloroh Anas pada sebuah kesempatan. Itu karena Anas tahu persis daerahnya, dan pariwisataalah yang menjadi *leading sector* pembangunan untuk keluar dari kemiskinan.

Anas pun berhasil menamakan komitmen tinggi kepada para kepala dinas terhadap fokus pembangunan yang telah digariskan, dengan segala inovasinya. Ia juga mampu menyampaikan visinya secara jelas ke aparat birokrasi di bawahnya. Inilah kunci penting keberhasilan Anas: visi pembangunan menginternalisasi dan menjawai seluruh aparatnya.

Beberapa program yang digarap Anas: *Banyuwangi Ethno Carnival*, *Banyuwangi Jazz Festival*, *Tour de Ijen*, *Banyuwangi Festival*, dan *Banyuwangi Eco-tourism*. Ia juga melengkapi sarana den-

gan membangun Bandara Internasional Banyuwangi. Sedangkan di bidang pendidikan ia membuat SAS (siswa asuh sebaya).

Hasilnya? Kemiskinan diturunkan ke level 7,52% (2019), padahal sebelumnya 20,09% (2010). Pendapatan per kapita melonjak menjadi Rp 51,80 juta per orang per tahun (2019), sebelumnya (pada 2010) hanya Rp 20,86 juta.

PDRB juga terus naik, menjadi Rp 83,61 triliun, sebelumnya hanya Rp 32,46 triliun. Turis domestik dari 654.602 orang (2010) menjadi 5,48 juta orang (2019). Turis mancanegara dari 16.977 orang (2010) menjadi 109.089 orang (2019).

Secara politik pun keberhasilan Anas tercermin dalam perolehan suara di pilkada periode kedua, yang mencapai 88,96%. Di periode sebelumnya hanya 49,23%.

Buah dari keseriusan pengaplikasian visi seorang pemi-



mpin telah dibuktikan oleh Anas: keluar dari kemiskinan, kabupaten berkinerja terbaik (peringkat pertama) se tanah air, dan pengakuan politik secara elektoral.

Bagaimana dengan Kabupaten Cirebon? Kini kita menjumpai angka-angka statistik yang memprihatinkan. Angka pengangguran tertinggi di Jabar dan tingkat kemiskinan lima terbesar di Jabar.

Pada 2021, persentase penduduk miskin di Kabupaten Cirebon mencapai 12,30%, atau sekitar 271,02 ribu jiwa. Sedangkan pengangguran terbuka sebanyak 10,38%, atau sekitar 112.429 pengangguran. Angka tersebut masih di atas angka pengangguran Provinsi Jawa Barat yang mencapai 9,82%.

Data 2020 pendapatan perkapita Kabupaten Cirebon sebesar 21,87 juta rupiah. Angka ini hampir sama dengan kondisi Banyuwangi 10 tahun yang lalu. Bahkan prosen-

tase kemiskinan di Banyuwangi waktu itu lebih parah (20,09%), kini mereka jauh lebih maju.

Sekarang, mari cek bagaimana penilaian Kemendagri terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Cirebon. Pada 2014, Kabupaten Cirebon berada di peringkat 64 dari 395 kabupaten seluruh Indoensia. Sedangkan pada 2017, Kabupaten Cirebon terjun bebas ke peringkat 316.

Ini lebih memprihatinkan lagi jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten tetangga. Indramayu yang sebelumnya (2014) di peringkat 123, pada 2017 di posisi 41, dan Majalengka yang sebelumnya di peringkat 66 menjadi 45.

Sedangkan Kuningan membuat capaian luar biasa, sebelumnya (pada 2014) di posisi 71 menjadi peringkat 5. Jadi, ketika para kabupaten tetangga unjuk gigi, Kabupaten Cirebon malah jeblok.

Eit...Namun, kita tak perlu

berlama-lama mera-tapi angka-angka yang memprihatinkan. Saatnya sekarang berubah, dimulai dengan (salah satunya) belajar dari Banyuwangi. Betapa visi seorang pemimpin telah menjadi mesin yang memompa kinerja.

Untuk itu pertama mari kenali potensi diri, lalu buat visi yang serius dan menjawab persoalan. Jangan asal hanya karena untuk memenuhi syarat mendaftar di KPUD, atau hanya pajangan di RPJMD.

Jika memiliki visi dan determinasi untuk mewujudkan visi, saya yakin dalam empat tahun sebuah daerah akan berubah, seperti halnya Solo, Surabaya, dan Banyuwangi. Saatnya sekarang membuat itu, tidak ada kata terlambat.

Di HUT Kabupaten Cirebon (yang konon) ke-540 ini mari kita mulai fokus membangun Kabupaten Cirebon. Jangan lagi setiap ulang tahun kabupaten, kita terjebak pada

isu artifisial: perdebatan hari lahir kabupaten dan kota Cirebon.

“Diskusi hari lahir bae, kapan diskusi mikiri rakyat,” begitu celetukan beberapa teman.

Waktunya kita menyusun ulang visi yang *beneran*, bukan formalitas, apalagi visi *bobadan*. Selamat ulang tahun Cirebon, bahagia selalu!



Internalisasi

Selamat pagi Pak, untuk keperluan apa ya, bisa kami bantu?" ujar seorang satpam ramah. Sapaan yang membuat saya nyaman. Serasa memasuki kantor perbankan nasional. Padahal ini adalah bank milik pemerintah daerah.

Apa yang sebenarnya terjadi pada satpam, sehingga sedemikian ramah? Seolah tiada lelah terus memancarkan kenyamanan? Saya bertanya-tanya sepanjang jalan menuju kantor, usai dari bank tersebut.

"Sepertinya ada yang ingin dicapai oleh bank ini," ucapku dalam hati. Saya buka aplikasi perambah di ponsel.

Tercantum di dalam website bank itu: "Visi: Menjadi 10 bank terbesar dan berkinerja baik di Indonesia."

Ini rupanya yang membuat satpam itu sedemikian ramah. Ia paham betul pentingnya menjaga nasabah. Tidak mungkin menjadi bank besar, bahkan terbesar, kalau nasabahnya sedikit. Ramah adalah salah satu jimat agar nasabah

MAU VISI TERCAPAI ?

Jangan lari dari arah ya...!

CIREBON
SEPERTI APA YANG
KALIAN INKINKAN
SEDULUR...?

SUDAHKAH VISI
CIREBON YANG BAHAGIA
MASYARAKATNYA, TERINTERNALISASI
KEDALAM TUBUH BIROKRASI,
ASN DAN MASYARAKAT?



CIREBON
YANG KUAT EKONOMINYA,
BERSIH APARATURNYA
TERJAMIN KEBUTUHAN RAKYATNYA,
RELIGIUS DAN BAHAGIA



tidak kabur ke bank lain.

Tiba di kantor, saya tanya beberapa ASN, mulai dari staf, eselon IV dan III secara random: “Apa visi Pak Bupati atau Kabupaten Cirebon?” Mereka menjawab sekenanya. “Dalam menjalankan tugas, adakah sesuatu yang menjadi penyemangat?” Rata-rata berpikirmya pada karir pribadi.

Visi yang dirumuskan pemimpin, idealnya, menginternalisasi ke semua pegawai. Dalam contoh visi perbankan di atas. Betapa visi perusahaan sudah menginternalisasi pada diri satpam. Berwujud dalam keramahan demi menjaga nasabah dan menjadi bank terbesar.

Internalisasi adalah kata serapan dari bahasa Inggris *internalisation* atau *internalization*. Dalam KBBI internalisasi disejajarkan dengan kata penghayatan. Arti *internalisation* aslinya adalah “tindakan menerima atau menyerap ide, pendapat, kepercayaan, atau

visi, sehingga menjadi bagian dari karakter dan berwujud pada perilaku.”

Sulit rasanya membayangkan Kabupaten Cirebon mewujudkan visinya, tanpa adanya internalisasi visi pada setiap pegawai. Jangan internalisasi, redaksi visinya saja tidak tahu. Jika pegawainya saja tidak tahu, bagaimana dengan *stakeholders* dan seluruh rakyat?

Internalisasi visi ke masyarakat itu justru kunci kemajuan. Provinsi Bali cukup berhasil menancapkan visi “Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya.” Andalan Provinsi Bali adalah pariwisata budaya dan alam. Hanya dengan visi itulah kunci pariwisata Bali terjaga.

Masyarakat Bali sadar betapa pentingnya wisatawan, sehingga mempertahankan budaya dan memperlakukan wisatawan dengan baik sudah menjadi karakter dan perilaku

mereka sehari-hari. Jika visi pemimpin sudah menginternalisasi pada rakyatnya, maka visi itu akan mudah dicapai.

Lembaran sejarah memberikan pelajaran bahwa pemimpin-pemimpin besar adalah mereka yang bervisi kuat, dan mampu menginternalisasikan visinya pada rakyatnya. Bung Karno, Soeharto, dan BJ Habibie adalah contoh pribadi visioner. Dengan caranya masing-masing, mereka mampu menginternalisasikan visinya kepada para pemangku kepentingan dan rakyat.

Bagaimana dengan Kabupaten Cirebon? Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019 tertuang visi: Terwujudnya Kabupaten Cirebon, Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman.

Sungguh visi yang luar biasa. Harus diimbangi dengan upaya yang luar biasa. Tidak

cukup ia hanya terpampang di dokumen RPJMD, apalagi halnya menjadi dokumen pelengkap saat mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah di KPU.

Ketika visi tidak menginternalisasi, susah rasanya mengajak pegawai bekerja keras mewujudkannya. Bayangkan, jika visinya ingin menciptakan daerah yang agamis, tapi ia bekerja hanya untuk kepentingan pribadi, bahkan korupsi, apa yang terjadi? Jauh panggang dari api.

Ini tugas kita semuanya agar visi itu menginternalisasi pada seluruh pegawai, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Ini bukan tugas dia, dia, atau dia. Tapi ini adalah tugas kita, tugas saya dan Anda. Mari mulai dari diri sendiri, sekarang. Emang mau kapan lagi?

CIREBON KATON • Maret 2020



Tolok Ukur

Malam semakin larut, entah ini tamu yang ke berapa. Sudah mengantuk juga sebenarnya. Namun, mata ini tiba-tiba menemukan ke-se-garannya kembali, ketika ia melemparkan pertanyaan yang tak biasanya dilakukan para tamu.

Kang, apa yang sudah dibangun selama 10 tahun terakhir di Kabupaten Cirebon?" Pertanyaan pendek, namun jawabannya bisa panjang. Tentu disini bukan ruang untuk menjawab pertanyaan itu secara detail.

Saya melihat pertanyaan itu sebagai curhat, bahwa ia

tidak merasakan pembangunan di Kabupaten Cirebon. Ketika rakyat merasakan seperti itu, pertanyaanya: Benarkah tidak ada upaya membangun kabupaten ini? Benarkah pemerintah tidak bekerja?

Selama 10 tahun terakhir saya yakin pemerintah sudah



HARAPAN:
BEBAS SAMPAH ✓
BEBAS BANJIR ✓
NOL PENGANGGURAN ✓

**Ini karena pemerintah
memakai 'tolAk ukur'
bukan 'tolOk ukur'**



bekerja. Tidak mungkin tidak melakukan apa-apa. Buktinya APBD terserap. Lantas masalahnya dimana? Kenapa ada gap antara apa yang dirasakan masyarakat dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah?

Gap terjadi ketika tidak adanya kesamaan tujuan atau keinginan antara rakyat dengan pemerintah. Bisa jadi, masyarakat inginnya apa, pemerintah mengerjakannya apa (yang lain).

Pada titik inilah perlunya tolok ukur yang sama. Sesuatu yang dipakai sebagai dasar mengukur (atau menilai)-nya harus sama; patokannya sama; atau standarnya sama. Maka, sejak awal belanja pemerintah harus dibuat 'membumi', berdasarkan masalah nyata yang dihadapi masyarakat.

Tolok ukur setidaknya harus diterapkan dalam tiga hal. Paling penting dan awal adalah perencanaan atau penyusunan

program kegiatan. Tahapan ini harus memiliki tolok ukur sama antara para pemangku kepentingan.

Jangan sampai perencanaan hanya sekedar rutinitas tahunan atau seremoni belaka. Penyusunan anggaran tidak hanya merupakan rangkaian seremoni penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), KUA (Kebijakan Umum Anggaran), PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara), dan APBD.

Tentu saja proses itu, secara administratif memiliki tolok ukur perencanaan yang sama. Namun permasalahannya apakah tolok ukur perencanaan hanya administratif. Perilaku *copy-paste* juga bisa memenuhi standar administratif, tapi apakah itu yang disebut perencanaan?

Hal fundamental dari perencanaan adalah bahwa apa yang direncanakan itu menjawab masalah. Nah, untuk itu, di dalam perencanaan

harus ada tolok ukur kedua yakni 'proses', dan tolok ukur ketiga, yakni 'hasil'. Agar setiap kegiatan, yang terumuskan mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat.

Tolok ukur proses ini penting untuk memastikan bahwa apa yang akan dilakukan memiliki cara yang benar-benar menjamin hasil. Ada kesinambungan tahapan antara satu periode pengerjaan dengan periode berikutnya. Ada kemenyatuan antara satu bidang atau dinas dengan dinas lainnya.

Berikutnya adalah tolok ukur hasil. Indikator keberhasilan program harus terumuskan dengan jelas, nyata, dan terukur, bukan indikator yang bersifat normatif dan retorika belaka. Jika semua tolok ukur tersebut ada dalam rangkaian penyusunan anggaran, bisa dipastikan APBD akan lebih berkualitas.

Sehingga harapannya, birokrasi bukan lagi sebagai

pabrik dokumen, yang menghasilkan atau mengumpulkan surat-surat dan laporan pekerjaan yang beribu-ribu halaman. Tapi hadir sebagai *problem solver*, sebagai solusi bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Jadi gandenglah selalu tolok ukur, agar kinerjamu terukur. Bukan tolok ukur, karena engkau akan menolak diukur. Biasakanlah sekarang mengucapkan tolok ukur (bukan tolok ukur), karena tolok ukurlah kata yang benar sesuai kaidah bahasa Indonesia.

Jika, 'tolak ukur' yang dipakai, maka pasti akan terjadi gap antara harapan masyarakat dengan kinerja pemerintah. Untuk itu mari kita budayakan tolok ukur saja.



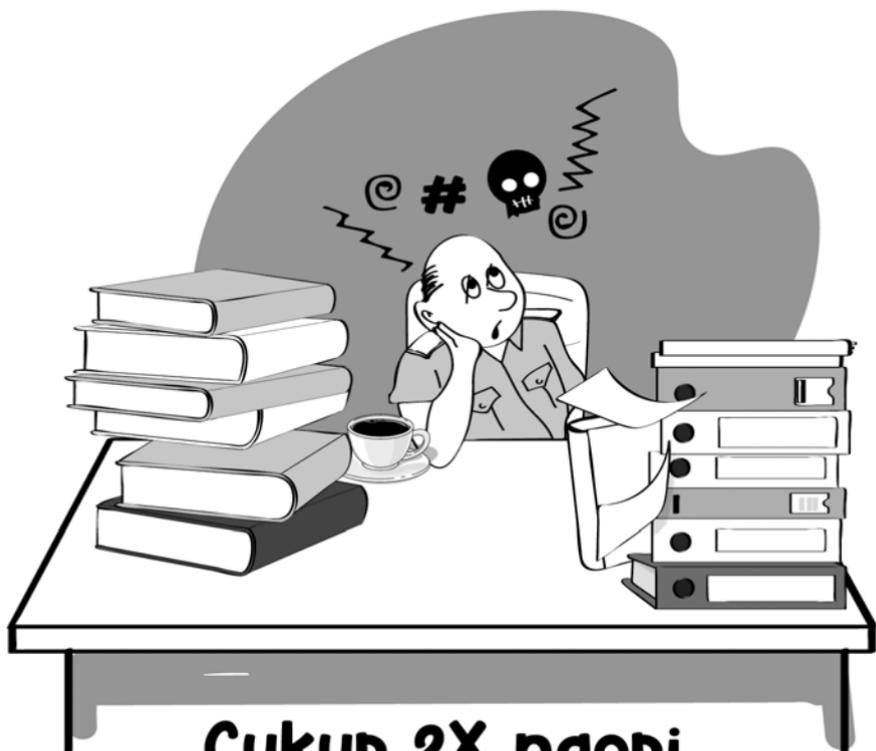
Kopi Tubruk

Pagi menuju siang di Januari 2023. Rinai gerimis jatuh nan lembut bak selimut. Seolah enggan menyerahkan bumi ke kehangatan mentari. “Sempurna,” saya membatain, “suasana yang pas menikmati kopi pagi.”

Saya memilih *tubruk* untuk menemani pagi yang *ngangeni* ini. Selain metode favorit dalam menyeduh kopi, *tubruk* adalah identitas, sekaligus filosofi yang pas untuk mengarungi 2023 yang syahdu menuju panasnya 2024.

Kopi *tubruk* adalah khas

Indonesia, karena itulah menjadi identitas. Jepang punya metode V60, Vietnam pakai *vietnam drip*, Turki dengan teko ibrik, Perancis dengan *france press*, Itali dengan moka-pot. Meski sebenarnya berbagai metode menyeduh kopi dari beberapa negara ini sekarang sudah lazim di warung-



**Cukup 2X ngopi
urusan jadi simple
dan mudah bro...
pake tubruk lebih asyik**



warung kopi di Indonesia.

Tubruk ini simbol kesederhanaan. Dia tidak butuh alat khusus nan mahal, seperti metode menyeduh kopi di beberapa negara di atas. Untuk membuat kopi *tubruk*, cukup dengan cangkir, sejumput kopi, dan air panas.

Kesederhanaan itulah yang membuat kopi *tubruk* juga mudah dibuat, alias simpel. Cukup dengan bubuk kopi dimasukkan ke cangkir, lalu tuang air panas secukupnya secara perlahan; bisa juga sebaliknya, air panas dituang dulu ke cangkir, lalu taburkan kopi di atasnya perlahan. Biarkan beberapa menit, agar terjadi pelepasan karbondioksida dan proses ekstraksi sempurna, serta bubuk kopi mengendap. Lalu nikmati, sungguh simpel.

Karena sesederhana dan sesimpel itulah, alias tidak perlu teknik macam-macam, kopi *tubruk* menjadi kopi yang paling jujur disajikan. Ia

tampil dengan polos dan apa adanya, serta dibuat tanpa ada rekayasa alat atau teknologi apapun.

Dari sisi rasa, kopi *tubruk* juga paling lengkap. Unsur pahit, coklat, asam, dan gurih menyatu secara unik dan apa adanya. Satu kata yang menggambarkan rasa kopi *tubruk* adalah mantap!

Hal yang sama juga pada aroma. Kopi *tubruk* menghasilkan aroma yang khas dan kuat. Harumnya menyeruak memenuhi ruangan. Keharuman kopi *tubruk* membangkitkan semangat dan kebahagiaan di pagi hari.

Begitulah memang kebahagiaan. Ia hadir dari sesuatu yang sederhana, simpel, dan jujur. Ketiganya (sederhana, simpel, dan jujur), jika digabungkan akan menghasilkan kemantapan dan kekuatan diri dalam mengarungi hari.

Nah, kalau sahabat masih gamang menghadapi hari yang menantang, cobalah

seduh kopi *tubruk*. Santai sejenak, nikmati setiap seruputannya, lalu renungi dan ambil pelajaran: (1) bahwa bahagia itu hadir dari sesuatu yang sederhana, simpel, dan jujur; (2) dengan bahagia itu kita lebih mantap dan kuat menghadapi hidup.

Terlebih jika sahabat adalah penikmat kopi sejati, temukan bahwa di balik secangkir kopi *tubruk* tanpa gula itu ada rasa khas manis kopi. Konon, beberapa riset menunjukkan bahwa menyajikan kopi yang sehat itu tanpa pemanis buatan.

Jika sudah merasakan manisnya kopi tanpa pemanis, itulah rasa terdalam yang bisa kita cecap dari kopi. Begitupun hidup, dibalik setiap kepahitan selalu ada manis yang tersembunyi. Maka, jangan lupa mulailah segalanya dengan bahagia.

Sebagai media bersosial, kopi juga sering menjadi sarana pemecah kebuntuan.

Maka, nikmatilah kopi *tubruk* secara bersama-sama, jauh lebih nikmat, akrab dan bahagia. Kebahagiaan bersama itulah yang membuat setiap ketegangan menjadi cair dan mudah teruraikan.

Jika, satu kali *ngopi* bersama belum selesai. Cobalah *ngopi* bareng yang kedua. Kalau belum *deal* juga, maka sering-seringlah *ngopi*. Kalau belum selesai juga, yang penting kita sudah bahagia, dan kebuntuan akan menemukan jalannya sendiri.

Jadi, jika ada yang bertanya, bagaimana mempersiapkan diri di 2023 menuju panasnya politik di 2024? Jawabannya: kopi *tubruk* saja.



Kopi Lanang

Sebenarnya biji kopi ini anomali, alias kelainan, beda dengan biji kopi pada umumnya. Sebut saja, tidak normal. Namun, biji yang diberi nama kopi lanang ini justru dipercaya lebih berkhasiat, dan tentu saja berharga lebih mahal.

Umumnya (normalnya) dalam satu ceri kopi, terdapat dua biji (dikotil). Satu permukaan biji normal berbentuk pipih, dan satu permukaan lainnya cembung. Sedangkan ceri kopi anomali, hanya terdapat satu biji kopi (monokotil). Inilah yang disebut sebagai biji lanang atau

peaberry. Bentuknya bulat melonjong seperti kacang, cenderung utuh tanpa terbelah.

Jumlah kopi lanang ini tidak banyak. Dalam satu kilogram ceri kopi, biasanya terdapat sekitar 50 gram kopi lanang, atau sekitar 5%. Apa karena langka ini jadi mahal? Ya, tapi faktor utama yang



**Kopi lanang:
kopi cacat bikin menang**



membuatnya mahal adalah khasiat yang diyakini dari biji kopi ini.

Kopi lanang diyakini mampu mendongkrak kinerja alat vital laki-laki. Keyakinan ini tentu berdasarkan pengalaman beberapa orang yang telah mengkonsumsinya. Selain itu, sebuah penelitian ilmiah menunjukkan bahwa mengkonsumsi *peaberry* dapat meningkatkan hormon testosteron dan gairah laki-laki. Karena hal inilah, ia disebut kopi lanang.

Bevo Wahono (2016) dalam penelitiannya berjudul *Effects Of Peaberry Coffee On The Sexual Behavior and The Blood Testosterone Levels Of The Male Mouse (Mus musculus)* mengungkap khasiat kopi lanang. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah tikus putih (mencit) jantan.

Penelitian itu menunjukkan bahwa mencit yang diberi kopi lanang mengalami peningkatan hormon testos-

teron, hingga mencapai 8 x 100ng/dL, sedangkan yang mengkonsumsi kopi normal konsentrasi testosteron hanya 7 x 100ng/dL.

Peningkatan hormon testosteron tersebut memicu perilaku mencit lebih agresif. Mencit yang tidak diberi asupan kopi biasanya melakukan "*kissing vagina*" hanya 2 kali sehari, setelah diberi kopi lanang meningkat hingga 6 kali sehari. Sedangkan mencit yang diberi kopi normal aktivitas "*kissing vagina*" hanya 3 kali sehari.

Penelitian itu menunjukkan bahwa di balik ketidaknormalan biji kopi, ada sebuah keunggulan. Di balik sesuatu yang cacat atau kekurangan, ada sebuah kelebihan. Begitulah kopi lanang mengajarkan bahwa hidup ini penuh keseimbangan.

Keseimbangan pada ketidaknormalan itu tentu juga berlaku bagi makhluk lainnya di bumi ini. Keadilan tidak

akan terlepas dari ciptaan Tuhan Yang Maha Adil. Begitu pun dengan saudara-saudara kita yang lahir memiliki keterbatasan (disabilitas).

Betul bahwa ada kekurangan, tapi mereka juga memiliki keunggulan. Seorang tunanetra misalnya, dia akan memiliki kemampuan pendengaran, penciuman, dan perabaan yang lebih sensitif ketimbang manusia normal lainnya.

Dengan kemampuan pendengaran yang tajam mereka mampu mengoperasikan gawai dengan layar dimatikan (digelapkan). Bagi orang normal, itu sesuatu yang ajaib dan menakjubkan.

Artinya meski seseorang tidak mampu melihat, namun ia dapat mengoperasikan alat kerja, seperti komputer, laptop, atau ponsel secara baik. Karena itulah, mereka pun dapat bekerja atau produktif seperti orang kebanyakan.

Dengan fakta dan keyakinan itulah, DPRD Kabupaten

Cirebon berupaya agar para penyandang disabilitas dapat kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan. Terlebih, kita sudah sering menyaksikan banyak kaum disabel yang justru berprestasi mengalahkan manusia normal.

Itulah salah satu alasan bagi DPRD Kabupaten Cirebon menyusun Perda tentang Disabilitas. Ra-perda ini sedang digodok, mohon dukungan agar segera selesai. Harapannya potensi dan keunggulan kaum disabel dapat berperan penting dalam pembangunan Kabupaten Cirebon.



Dewan

Pernahkan Anda berpikir, bahwa setiap manusia adalah dewan? Tentu saja saya tidak sedang bercanda. Ini serius. Sebab, jika memahaminya, Anda akan menyadari sebuah kekuatan yang super dahsyat ada pada diri Anda.

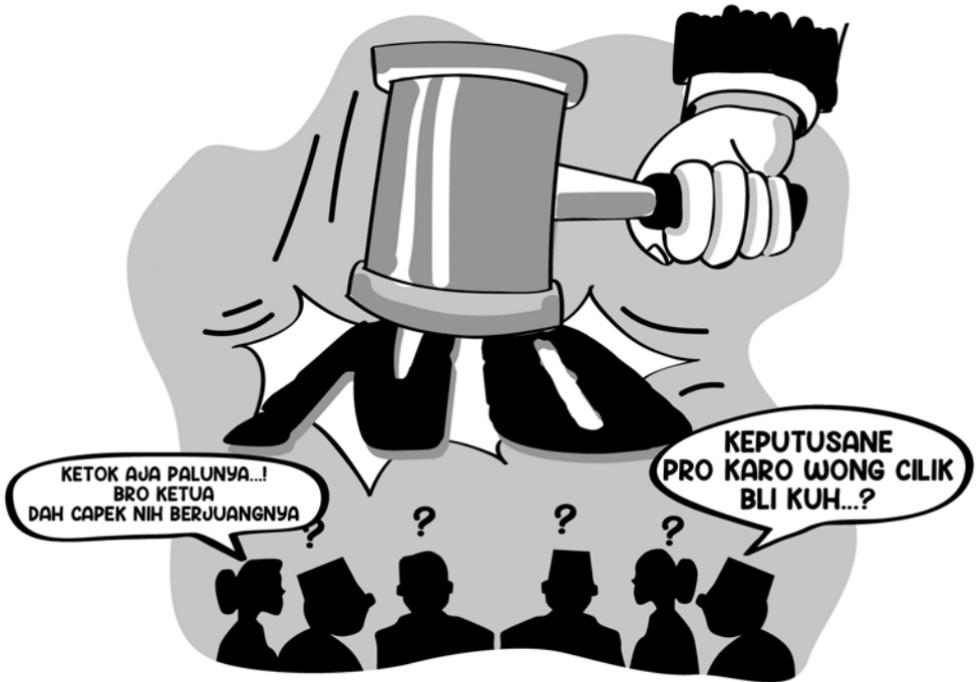
Dewan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah majelis atau badan yang terdiri atas beberapa orang anggota. Pekerjaannya berunding, memberi nasihat, dan memutuskan sesuatu.

Merujuk pada definisi di atas, bisa dipastikan Anda

seorang dewan bukan? Bukan lagi anggota, tapi dewan. Anda adalah badan, yang memiliki beberapa anggota, seperti tangan, kaki, mata, telinga, mulut, dst.

Bahkan, bisa jadi Anda itu adalah super dewan. Selain terdiri dari anggota yang kasat mata, dalam diri Anda

**Hai Dewan...
Ada amanah rakyat
di pundakmu,
kalian harus amanah.**





juga ada yang tidak kasat mata: perasaan, emosi, nafsu, pikiran, hati, dan jiwa.

Belum lagi, kalau Anda berperan sebagai makhluk sosial. Maka, dalam diri Anda ada aspirasi orang lain. Jika seorang kepala keluarga, misalnya, maka ada aspirasi istri, anak, orang tua, hingga pembantu.

Itu baru satu peran. Bagaimana pula jika Anda memiliki banyak predikat, misalnya sebagai makhluk politik (politisi), pengusaha, ketua organisasi, hingga tokoh masyarakat/agama. Akan semakin banyak lagi aspirasi yang berelasi dengan Anda.

Sebagai sebuah dewan, pernahkan para anggota Anda berunding, bermusyawarah? Kalau Anda menjawab 'tidak', maka sungguh terlalu Anda ini. Bukan terlalu karena seumur hidup dewan kok gak pernah bermusyawarah, tapi terlalu kok bisa Anda tidak menyadarinya.

Sadarlah bahwa setiap keputusan tindakan dalam hari-hari Anda adalah sebuah hasil musyawarah para anggota. Baiklah, saya akan menjelaskannya pada Anda. Katakanlah Anda ingin memecahkan sebuah batu untuk kebutuhan pondasi rumah.

Anda memutuskan menggunakan godam untuk memecahkannya. Nah..., keputusan itu sebenarnya hasil musyawarah para anggota yang berjalan super-sekian detik dalam diri Anda.

Ketika Anda akan memecahkan batu itu, tangan Anda menyatakan pendapat: "Saya tidak mampu memecahkannya, butuh tenaga yang lebih kuat, mungkin kaki bisa."

Lalu, kaki menjawab: "Saya pun tak mampu, batu ini terlalu keras. Bagaimana kalau memakai godam, dan yang bisa memegang godam adalah tangan. Saya kaki akan membantu menopang saja."

“Baik, saya akan lakukan,” kata tangan. “Namun agar pukulan godam tepat sasaran, saya minta agar mata jeli melihat posisi batu,” pinta tangan kepada mata.

Lalu mata menjawab: “Saya akan lakukan yang terbaik, namun agar saya bisa tetap melihat dengan jeli, saya butuh pelindung dari percikan batu. Saya butuh helm dengan pelindung muka yang kuat,” ujar mata. Begitulah musyawarah itu berjalan sangat cepat.

Musyawarah sejenis tentu juga terjadi di setiap keputusan tindakan Anda. Allah SWT memberikan mekanisme syuro (musyawarah) dalam diri Anda ini begitu otomatis, dan berjalan dengan sangat cepat. Ini anugerah yang luar biasa.

Dewan berupa tubuh Anda memberikan pelajaran, bahwa cermat, tepat, dan akuratlah dalam mengambil kebijakan dan keputusan tindakan. Apalagi menyangkut aspirasi dan hajat hidup

orang banyak.

Itulah sebabnya dalam menjalankan tugas sehari-hari, mekanisme berunding itu saya jalankan secara serius. Saya ingin memastikan bahwa setiap ang-gota menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Saya ingin agar di setiap keputusan ada suara rakyat. Ada aspirasi yang benar-benar tersalurkan. Ada manfaat yang harus diterima rakyat.

Kadang di tengah lelah persidangan ada yang nyeletuk: “Udahlah Kang langsung ketuk saja, tidak perlu dibahas panjang lebar.” Tentu saja saya tidak mengikutinya.

Malu rasanya pada dewan tubuh ini, jika kita asal mengambil keputusan. Jika tubuh saja cermat, maka dengan segala potensi kemanusiaan yang kita miliki, kita harus lebih dewan dari tubuh. Apalagi ada amanah rakyat di dalamnya.

CIREBON KATON • April 2020



Mental Pariwisata

Di Majalah Cirebon Katon Edisi Oktober 2021, saya menulis soal rasa wisata. Di tulisan itu, saya menekankan betapa pentingnya mempersembahkan rasa kepada wisatawan. Tidak usahlah berniat menata pariwisata, jika tak memahami nilai di balik rasa. Karena rasa itulah yang ingin dinikmati wisatawan. Lantas darimana rasa itu bisa dihadirkan?

Rasa itu hadir dari insan pariwisata, terutama birokrat, yang bermental pariwisata. Jika mental ini tidak menginternalisasi pada setiap diri aparatur, maka lupakanlah bicara soal penataan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Cirebon.

Jika aparatur pariwisata

hanya berpikir bagaimana caranya menghabiskan anggaran, tanpa peduli rasa wisata dan kualitas belanja, maka jangan harap potensi pariwisata Kabupaten Cirebon dapat dikelola dengan baik.

Dengan begitu lupakan juga keinginan pemrintah membuat Rencana Induk



**Wisata itu
membuat jembatan,
bukan membangun
tembok.**



Mohamad Luthfi

Pariwisata Daerah (Riparda) dalam bentuk Perda. Beberapa kali Raperda ini singgah ke meja saya, berulang kali juga saya koreksi dan minta diperbaiki.

Dalam Raperda tersebut, saya belum merasakan adanya rancangan peraturan yang ingin membuahakan rasa untuk dipersembahkan kepada wisatawan. Raperda itu belum lahir dari perenungan yang mendalam dari seseorang atau tim yang berjiwa wisata. Kesan asal kerjaan selesai dan hasil salin-tempel (copy paste) lebih kentara.

Lantas seperti apakah karakteristik birokrat pariwisata? Ia harus memiliki pemahaman yang kuat tentang industri pariwisata, termasuk tren, tantangan, dan peluangnya. Juga mengetahui detail destinasi wisata, budaya, dan aset pariwisata lokal.

Birokrat pariwisata harus mampu merencanakan dan mengelola program-program

pariwisata yang efektif, baik dari sisi perencanaan promosi, manajemen aset pariwisata, dan alokasi sumber daya. Jika perencanaan promosi tidak terintegrasi, maka itu gambaran betapa jauh panggang dari api.

Birokrat pariwisata juga harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, komunitas lokal, dan wisatawan. Jika menata Kawasan Wisata Religi Gunung Jati saja masih 'berantem' terus, maka segeralah 'belajar membangun jembatan, bukan tembok'.

Pariwisata adalah wilayah kreatif. Kreativitas akan melahirkan produk dan promosi wisata yang inovatif. Karena itulah insan pariwisata adalah orang-orang yang bermental bahagia dan memancarkan energi positif. Bukan sebaliknya: kaku, tak peduli, intimidatif, dan arogan.

Di era big data ini, kemampuan membaca dan

menganalisis data menjadi kunci persaingan pariwisata, baik secara nasional maupun internasional. Kemampuan ini akan memudahkan memahami tren wisatawan, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan data dan bukti yang kuat.

Industri pariwisata selalu berubah, jadi seorang birokrat pariwisata yang efektif harus siap untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan terbaru dalam industri ini. Teknologi informasi bisa sangat membantu untuk akses dinamisasi ini, juga untuk kegiatan promosi dan keparipurnaan pelayanan.

Terakhir, birokrat pariwisata harus memiliki kemampuan mengelola krisis dan merespons dengan cepat. Industri pariwisata termasuk rentan terpengaruh oleh faktor eksternal, seperti bencana alam, keamanan, atau perubahan kebijakan nasional maupun regional.

Setelah melihat deretan karakteristik dan mental pariwisata di atas, menjadi birokrat pariwisata itu berat ya? Kalau kata anak zaman now: Kena 'mental' nih? Makanya, bangun mental pariwisatamu, biar gak kena 'mental' terus.



Glagepan

Jika Bahasa Cirebon punah apakah kamu rela? Pertanyaan itu beberapa kali saya lontarkan ke beberapa orang dengan usia yang berbeda. Tentu saja jawabannya beragam. Namun, ada satu yang menarik, dengan berbalik bertanya: emang bahasa bisa punah?

Tentu saja bisa. Catatan Kemendikbud ada 11 bahasa daerah yang sudah punah, enam berstatus kritis (penuturnya berusia 40 tahun ke atas), dan 25 bahasa daerah terancam punah (jumlah penutur berusia 20 tahun ke atas hanya sedikit). Idealnya, seiring dengan perkembangan

populasi manusia dan teknologi informasi, Bahasa harusnya berkembang. Perkembangan bahasa salah satunya bisa dilihat dari penambahan jumlah kosa kata dari tahun ke tahun.

Pada 1953 jumlah kosakata Bahasa Indonesia hanya 23 ribu. Kini, sesuai data dari

Coba sebutkan
budaya Cirebon
dan jelaskan
menggunakan
Bahasa Cirebon

hemppppp...



**Kalau seperti ini,
kebudayaan Cirebon itu
maju apa mundur ya?**



laman KBBI, sudah mencapai 120.375 kosakata. Jumlah ini jika dibandingkan dengan bahasa lain termasuk sedikit. Bahasa Inggris sudah mencapai 1,1 juta kosakata, dan Bahasa Arab 12,3 juta kosakata.

Nyatanya, menurut catatan Kemendikbud di atas bahasa daerah mengalami penurunan. Lantas apakah yang menjadi penyebab kemunduran bahasa daerah? Beberapa penelitian menunjukkan faktor kemunduran bahasa daerah antara lain karena adanya persepsi bahwa bahasa daerah itu simbol keterbelakangan, kemiskinan, dan dianggap tidak gaul.

Bagaimana dengan Bahasa Cirebon? Tak jauh beda. Pertanyaan yang lebih penting adalah adakah upaya untuk melestarikan Bahasa Cirebon? Minimal ada tiga elemen penting untuk pengembangan bahasa daerah: Lembaga Bahasa, pendidikan formal dan

kegiatan pendukung, serta kamus bahasa daerah.

Lembaga Bahasa jelas belum ada. Pendidikan formal belum mendukung sepenuhnya. Ada beberapa daerah yang kesehariannya berpenutur Bahasa Cirebon justru muatan lokal pelajaran di sekolahnya bahasa daerah lain. Tidak masalah sebenarnya, asal Bahasa Cirebon juga diajarkan.

Nah, bagaimana dengan kamus? Coba jawab *sing teges, aja gremung*: Jika engkau orang Cirebon, pernahkah membaca kamus Bahasa Cirebon? Lah kok malah *glagepan*. Santai saja, tarik nafas dulu. Kalau jawabannya 'belum pernah', Anda tidak sendirian. Banyak manusia Cirebon lainnya yang belum pernah menyentuh, bahkan melihat barang langka itu.

Ada juga yang *ngeles*: *Kita kan wong Cerbon asli Kang, ora perlu kamus*. Betul, tapi kamus adalah alat ukur bahwa ba-

hasa (kosakata) berkembang, sekaligus alat penjaga dari kepunahan. Kamus Bahasa Cirebon-Indonesia tercatat pernah diterbitkan pada 1992 oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Kenapa Bahasa Cirebon tidak boleh punah? Kalau kita bicara mengenai penguatan budaya, maka bahasa adalah fondasi budaya sebuah daerah. Bahasa adalah komponen budaya yang sangat penting dan kompleks. Bahasa mencerminkan cara pandang (*worldview*), nilai-nilai, tradisi, dan identitas budaya suatu masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan disebutkan bahwa ada 10 objek pemajuan kebudayaan (OPK), yakni Tradisi Lisan, Manuskrip, Adat Istiadat, Permainan Rakyat, Olahraga Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Tek-nologi Tradisional, Seni, Ritus, dan Bahasa.

Pemerintah Kabupaten Cirebon Bersama DPRD kini sedang menggodok Perda tentang pemajuan kebudayaan. Perda ini, idealnya mengatur upaya strategis semua pemangku kepentingan tentang 10 OPK tersebut, terutama penguatan fondasi budaya: bahasa daerah.

Lembaga Bahasa harus didirikan. Lembaga ini punya tugas untuk mengembangkan Bahasa Cirebon, termasuk di dalamnya secara berkala memperbaharui kamus Bahasa Cirebon. Lembaga ini juga punya peran strategis mensinergikan lembaga pendidikan formal untuk meningkatkan minat generasi muda menggunakan Bahasa Cirebon.

Harapannya, tak ada lagi manusia Cirebon yang *glagepan* budaya, terutama berbahasa Cirebon.



Mantan

Ini bukan sembarang mantan. Istimewa, saya menganggapnya begitu. Meski mantan, dia tetap penting sepanjang zaman. Bahkan, tanpanya eksistensi pemerintahan, atau negara bisa terancam.

Dari sisi tertentu, arsip bisa disebut mantan. Bahkan, barang bekas. Seperti umumnya mantan, ia sering dilupakan, kurang menarik, dan --dalam perspektif para pencari proyek—kurang menguntungkan, bukan lahan basah.

Wajar, bila aparaturnya yang

ditempatkan di situ dianggap sebagai orang terbuang. Anehnya lagi, hal itu juga menancap di alam bawah sadar top manajemen. Para pejabat ‘menghukum’ aparaturnya ‘bandel’ dengan ditempatkan di institusi kearsipan. Jadilah, semakin kuat persepsi keliru itu: sebagai lembaga buangan.

Ayo yang semangat,
jangan biarkan ini hilang
dari catatan sejarah

Iya, Cukup
mantan saja
yang menjadi
sejarah yang
tak tercatat





Richardo J. Alfaro, pegiat arsip, mantan Presiden Panama, dengan lantang membantah hal itu. Ia berkata: “Pemerintah tanpa arsip ibarat tentara tanpa senjata, dokter tanpa obat, petani tanpa benih, dan tukang tanpa alat.”

Sebegitu vitalnya peran pengelolaan arsip kok disebut ‘buangan’. Harusnya sebaliknya, memiliki kebanggaan berlipat. Pasalnya, diberi amanah menghidupkan jantung eksistensi negara, terutama aspek legal atau hukum.

Selain persoalan legalitas, arsip berfungsi sebagai pelestari sejarah. Ia mencatat peristiwa, se-hingga perjalanan hukum, budaya, politik, dan sosial dapat dihargai dan dipelajari.

Keberadaan arsip memastikan bahwa kita dapat belajar dari masa lalu; menjaga fungsi pemerintahan; mendukung pengambilan keputusan; melestarikan warisan budaya; dan menyelidiki berbagai

aspek kehidupan rekam jejak manusia.

Sepanjang waktu diskursus kearsipan selalu berputar tentang media penyimpanan. Dulu mulai dari media gambar, kemudian video, dan kini ramai penyimpanan digital. Jika kini kita masih bertanya kapan arsip kita disimpan secara digital? Maka bisa dipastikan pertanyaan itu sudah ketinggalan zaman.

Pertama, era *artificial intelligence* (AI) harusnya digitalisasi sudah selesai. Karena pengelolaan arsip secara AI mensyaratkan arsip sudah dikelola secara digital. Jika, hari ini Kabupaten Cirebon masih debat kapan digitalisasi, maka halooo...engkau hidup di zaman apa sih?

Kedua, idealnya diskusi hari ini bukan lagi soal arsip disimpan dengan media apa? Tapi bagaimana penyimpanan itu dikemas menjadi seperti ‘mesin waktu’. Baik digitalisasi maupun AI arsip harus

disajikan dengan kemampuan membawa seseorang ke dalam mesin waktu.

Mesin itu mampu menghubungkan seseorang ke waktu ketika arsip itu diproduksi hingga perjalanannya sampai ke masa kini. Artinya arsip bukan hanya disimpan begitu saja. Tapi penyimpanan itu mampu menyertakan ruh dan semangat zaman sang arsip.

Dengan kesadaran ini kami mengajak semua aparat negara jangan sungkan (apalagi mengabaikan) pengarsipan. Tak ada lagi cerita arsip penting berhias kotoran cecak dan tikus tergolek pasrah di toilet bekas di pojok belakang kantor.

Berjuanglah melestarikannya, sebagaimana para pejuang melahirkan negara ini. Bersemangatlah seperti halnya ketika engkau bersemangat melahirkan dokumen yang kini disebut arsip itu.

Ke depan, tak perlu lagi memberikan anggaran besar

(cukup) untuk mengelola arsip. Pengelolaan arsip bukan beban (*cost*), tapi *investment*.

Investasi yang menjamin keberlangsungan hidup kita, dan melahirkan generasi pembela-jar yang andal. Ge-nerasi yang pada gilirannya meneruskan kejayaan negeri ini.

Jadi, jangan biarkan peristiwa penting hilang dari catatan sejarah. Jangan pula membiarkan ruh, semangat, perjuangan, air mata, dan cinta terlepas dari catatan sejarah itu. Cukup *mantan* (pacar) saja yang menjadi sejarah yang tak tercatat.



Gambit Menteri

Dalam berbagai kesempatan sering saya mendapat pertanyaan: “Kang kapan Cirebon kuh bisa maju? Aja mengenken bae sih.” Saya melihatnya itu bukan pertanyaan biasa. Tapi, berupa curahan dari kedalaman hati, sekaligus juga tantangan.

Ya, tantangan. Seolah ia berkata: “Sebagai wakil rakyat, apa yang bisa dilakukan untuk Cirebon lebih baik?” Tentu saja ini hal yang positif. Sebagai pengingat dan pelecut kinerja. Saya berterimakasih untuknya. Memang, berbagai indikator ekonomi menunjukkan

bahwa Kabupaten Cirebon termasuk tertinggal, dibanding Kabupaten lain di Jawa Barat. Wajar jika warga merasakan ‘*mengkenen bae*’.

Dalam kondisi tertinggal, tentu semaksimal mungkin harus membuat sebuah perencanaan dan aksi yang juga tidak *mengkonon-mengkonon*





bae. Harus berbeda, inovatif, berani, dan komprehensif.

Pemerintah bersama DPRD Kabupaten Cirebon kini sedang menggodok Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW). Perda ini diharapkan menjadi pondasi pembangunan dan pengembangan Kabupaten Cirebon, baik secara tata ruang, tata wilayah, maupun tata kelola ke depan.

Hal penting yang harus diakomodasi dalam Perda ini adalah menjadi dasar pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu diharapkan menjadi solusi berbagai permasalahan lingkungan seperti pencemaran, banjir dan sampah.

Untuk itu kita perlu memainkan strategi yang ciamik agar tata ruang dan wilayah dapat mampu secara maksimal memompa segala potensi yang ada, baik potensi tanah, sumber daya alam, maupun

sumber daya manusia.

Strategi yang dipilih harus agresif. Ibarat catur, pembukaan *gambit menteri* cocok untuk menggambarkan situasi ini. Strategi biasa, seperti *gambit raja* apalagi *pertahanan india* tentu kurang pas.

Gambit menteri sebenarnya bukanlah strategi baru dalam dunia catur. Strategi ini sudah disebutkan dalam manuskrip Gottingen 1490. Pembukaan bidak di depan menteri ini kemudian populer setelah turnamen di Wina pada 1873.

Pembukaan ini dinilai agresif karena (1) dengan cepat para perwira bebas bergerak dan berdaya, dan (2) penguasaan area lebih luas dan maksimal. Syaratnya memang ada satu bidak di depan gajah (peluncur) dikorbankan.

Perwira bebas bergerak bisa menjadi simbol --dalam konteks penyusunan RTRW-- bahwa potensi SDM yang ada di Cirebon bisa diberdayakan secara maksimal, tumbuh dan

berkembang berpartisipasi membangun. Sedangkan, penguasaan area dapat berarti ruang atau wilayah yang ada di Cirebon dapat produktif maksimal, area yang tadinya mati bisa menjadi hidup dan menghidupi.

Sementara bidak yang dikorbankan bisa diartikan harus ada sedikit ruang atau wilayah yang dikorbankan. Pengorbanan ini wajib menjadi pemantik hidupnya ruang yang lain. Pada akhirnya SDM dan SDA dapat maksimal diberdayakan.

Pada titik itu industri dan perdagangan akan tumbuh di semua sektor, terutama pariwisata, pertanian, kelautan, dan manufaktur. Ekonomi akan tumbuh, pengangguran terkikis, dan kesejahteraan meningkat.

Jadi jika nanti dalam Perda RTRW ada sedikit ruang yang 'dikorbankan' bukan berarti destruktif, tapi dalam kerangka tujuan besar tersebut. Jika

nanti ada sedikit area pertanian atau pantai yang berubah peruntukkan, maka yakinlah itu demi kebaikan bersama.

Jika tidak ada kesadaran bersama dan dukungan semua elemen masyarakat maka sulit kita melakukan akselerasi. Jangan harap kita bisa melepaskan diri dari kemiskinan dan membengkaknya angka pengangguran, apalagi berharap mampu bersaing dengan kabupaten lain.

Pilihannya *gambit menteri*, atau *kaya kenen bae!*



Kookboek

Katakan padaku apa yang kamu makan, aku akan memberitahumu siapa dirimu. Begitulah Jean Anthelme Brillat-Savarin (1755-1826) menggambarkan betapa makanan dapat menceritakan banyak hal, termasuk tentang identitas dan karakteristik seseorang.

Karena makanan pulalah kehidupan manusia di dunia ini dimulai dan dapat dijelaskan. Akibat salah makan, yang dilakukan Adam, bumi pun dihuni manusia. Inilah titik awal peradaban makanan bergulir.

Makan awalnya untuk bertahan hidup. Namun, ketika

api ditemukan dan manusia mulai mengenal rasa dan estetika, mereka mulai berlomba berkreasi mencipta makanan. Sebagian orang bahkan kemudian menganggap hidup untuk makan.

Namun, ketika makanan berbaur dengan tata nilai, baik nilai sosial, agama,





Mohamad Luthfi

dan kesehatan, makanan kemudian menjadi simbol kualitas gene-rasi dan peradaban. Makanan tidak lagi dinilai dari rasa dan estetika penampilan saja, tapi juga harus baik, sehat, dan halal.

Dalam tata kehidupan sosial, makanan juga menjadi tolok ukur kelas sosial dan ekonomi. Bagi orang Timur, makanan bahkan menjadi representasi filsafat hidup komunitas pembuat dan pemakannya. Di sinilah perkataan Brillat-Savarin di atas menjadi relevan. Makanan dapat menjelaskan siapa yang memakannya.

Dalam konteks negara, makananpun menjadi identitas kebangsaan dan budaya. Inilah yang disadari oleh pendiri bangsa ini. Soekarno memandang penting makanan khas Indonesia untuk dilestarikan dan keberadaanya harus diakui sebagai warisan budaya non benda.

Pada 1960, Soekarno me-

merintahkan Menteri Pertanian Brigjen. dr. Azis Saleh untuk membuat buku tentang resep makanan yang ada di seluruh Indonesia. Saleh pun kemudian memerintah jajarannya untuk menyusun buku itu.

“Sesuai dengan pembicaraan saya dengan Presiden, maka supayalah Lembaga Teknologi Makanan nanti diberi tugas untuk menyusun suatu *kookboek* yang lengkap untuk seluruh Indonesia,” tulis Saleh dalam Memo kepada Sekjen Kementerian Pertanian tertanggal 12 Desember 1960.

Sejak saat itu *kookboek* (buku resep) itu disusun, dan terbit pertama kali pada 1967. Buku setebal 1.207 halaman itu diberi judul *Mustikarasa*. Buku yang memuat lebih dari 1.600 resep kuliner Indonesia itu kemudian diterbitkan ulang pada 2016.

Lewat buku itu, Soekarno sepertinya ingin menyampaikan pesan bahwa seorang

negarawan haruslah mengenal negaranya, salah satunya lewat makanan. Seolah ia berkata: “Kenalilah makanan bangsamu, maka engkau akan mengenal siapa rakyatmu, dan engkau akan mampu membangun kesejahteraan bagi rakyatmu.”

Bagaimana dalam konteks lokal? Cirebon sebagai bagian dari Indonesia tentu saja juga kaya akan kuliner. Terlebih Cirebon adalah kota tua dan persinggahan perdagangan (pertemuan berbagai peradaban). Kuliner Cirebon menjadi simbol perpaduan dan akulturasi berbagai budaya.

Sudahkan orang Cirebon, terutama para pemimpinnya, mengenal kuliner Cirebon? Ataukah hanya menjadi penikmat kuliner saja? Atau bahkan menganggap kuliner Cirebon ketinggalan zaman, lebih menyukai makanan asing dan makanan instan?

Jika jawabannya merupakan respon atas pertanyaan

pertama, maka sangat bagus. Jika merupakan respon atas pertanyaan kedua, maka cukup bagus. Namun jika merupakan respon atas pertanyaan ketiga, maka sungguh memprihatinkan.

Sebagai negarawan lokal, ada baiknya meniru Bung Karno, pemerintah Cirebon perlu menyusun *Ceribon Kookboek*. Kegiatan tahunan pelestarian kuliner Cirebonpun perlu dilakukan, seperti lomba memasak makanan khas Cirebon.

Wisata kuliner Cirebon juga harus didorong menjadi pendongkrak ekonomi dan kesejahteraan. Se-hingga kualitas kehidupan meningkat, dan tidak ada lagi penderita gizi buruk di daerah kaya kuliner ini.



Dawa Buntute

Menyaksikan burung berekor panjang bergerak lincah di alam bebas itu pemandangan langka. Apalagi gacor, wah keren abiss... Bukan hanya burung yang lebih disukai jika berekor panjang, sebut saja ada kucing, monyet (monyet colobus), kadal rumput, dan ikan pari (pari macan tutul).

Bagaimana jika yang berekor panjang itu bisnis, terlebih jika usaha itu milik desa, alias Bumdes? Tentu saja menarik. Chris Anderson, seorang penulis Inggris-Amerika, mengupas ekor panjang dunia bisnis itu dalam satu buku: *The Long Tail: Why the Future of Business*

Is Selling Less of More.

Dalam buku ini Anderson menjelaskan bahwa bisnis yang bertahan di masa depan adalah bisnis berekor panjang. Seperti apakah bisnis berekor panjang itu? Anderson menjelaskan panjang lebar, detail, hingga ke teknis teoritis, bagi orang awam –



Bisnis Bumdes juga harus berekor panjang lho...



termasuk saya—tentu saja itu agak rumit.

Secara sederhana, bisnis ekor panjang adalah bisnis yang penjualannya bertahan lama, meski secara volume lebih sedikit. Artinya, usaha itu bisa menjual barang dengan terus-menerus, sepanjang waktu, meski jumlah barang yang terjual tidak dalam jumlah besar. Penjualannya membentuk ekor yang panjang, *buntute dawa*.

Ekor panjang ini bukan hanya dari sisi waktu (berjalan sepanjang masa), tapi juga jangkauan penjualannya panjang. Barang terdistribusi ke pembeli bukan hanya dalam lingkup desa, kabupaten, propinsi, atau nasional, tapi juga menembus batas negara, yakni ekspor.

Perda Bumdes yang baru saja disahkan DPRD kabupaten Cirebon adalah dengan semangat bisnis ekor panjang tersebut. Jika, dulu bisnis terpusat di kota-kota industri

dan hanya dimiliki oleh pemodal-pemodal besar, maka kini bisnis harus dikembangkan kepada pemilik sumber daya alam terdekat, yakni desa.

Meski diproduksi di desa, namun dia harus mampu ber ekor panjang. Pertama, dari sisi kedekatan dengan bahan produksi membuat bisnis berbasis desa berpotensi lebih lestari (ber ekor panjang). Kedekatan dengan akan membuat semangat bisnis juga melestarikan alam, bukan mengeksploitasi alam.

Kedua, teknologi informasi yang kini berkembang pesat membuat tidak adalagi sekat desa kota, atau desa kawasan industri. Semua bisa menjadi tempat produksi, termasuk dalam lingkungan rumah tangga. Tidak ada lagi istilah bahwa tempat produksi harus berdekatan dengan pusat pemasaran.

Artinya secara pemasaran, bisnis di desa pun mampu

menembus batas-batas ruang dan waktu. Meski produksi di desa, pemasarannya berekor panjang, bisa tersebar ke seluruh dunia.

Betul bahwa industri lain pun bisa melakukan pemasaran yang sama, namun desa punya kekuatan kedekatan dengan sumber alam. Terlebih ini akan membuat pemerataan kesejahteraan, yang bukan lagi milik segelintir pemodal besar, tapi juga milik warga desa. Jadi ekor kesejahteraan harus sampai ke desa, bukan lagi milik kota-kota besar.

Apakah Bumdes bisa melakukannya? Tentu saja. Sudah ada buktinya. Lihatlah Bumdes Megamendung Jaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berhasil mengekspor kopi ke Qatar dan Mesir. Bumdes Desa Luba Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor, NTT, mamapu mengekspor vanila ke Jerman dan Amerika. Empat Bumdes di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten

Kutai Kartanegara, Kaltim, bekerja sama mengekspor lidi nipah dan sawit ke Kanada.

Bagaimana dengan Cirebon? Potensinya besar, dari segi kekayaan alam kita punya laut, pantai, sungai, danau, pertanian, dan pegunungan. Dari sisi akses, kita punya lima pintu tol 10 stasiun kereta api, juga dekat dengan pelabuhan dan bandara. Semoga dengan disahkannya Perda tentang Bumdes dan Bumdesma, Kabupaten Cirebon punya Bumdes berekor panjang.

Jadi, *sing dawa buntute aja manuk bae*, Bumdes juga. Tentu saja, tujuannya agar warga desa juga bisa *gacor*, alias sejahtera dan bahagia.



Parkir Bus

September 2004, Jacques Santini dibuat geram oleh frase 'parkir bus'. Adalah Jose Mourinho yang pertama kali mengatakan frase itu. Ia mengkritik taktik Santini saat menukangi Tottenham Hotspur dalam lawatan ke kandang Chelsea, yang kala itu dilatih Mourinho.

Taktik Santini yang memarkir 10 pemainnya di depan gawang, membuat Mourinho kesal. Pasukannya tak mampu menembus pertahanan Hotspur. Mourinho dipaksa harus menerima hasil 0-0, sambil melabeli taktik Santini dengan parkir bus.

Jadilah: Mourinho kesal,

Santini geram. Itulah dinamika sepakbola, menuntut untuk terus berkreasi dalam teknik dan taktik. Kadang harus parkir bus, kadang juga harus *total football*, semua pemain, termasuk kiper turut menyerang.

Bagaimana dengan pengelolaan pemerintahan, ter-

Pertahanan rapih retribusi parkir gak gampang kebobolan





utama dalam peningkatan pajak dan redistribusi parkir? Manakah yang lebih cocok, parkir bus atau *total football*?

Di era sekarang pergerakan orang dan barang semakin tinggi. Jumlah kendaraan meningkat pesat. Tempat parkir menjadi kebutuhan yang tak terhindarkan, terutama di pusat kegiatan dan pelayanan masyarakat, seperti pasar, rumah sakit, pengurusan administrasi kependudukan, hingga kantor kepolisian.

Kondisi ini tentu memaksa pengelolaan parkir harus maksimal. Pertama, ini berkaitan dengan ketertiban umum. Bayangkan jika parkir liar terjadi di ruas-ruas jalan, tentu ini akan mengganggu mobilitas masyarakat, dan bisa menimbulkan kerawanan sosial.

Kedua, parkir yang berserakan juga sangat mengganggu keindahan sebuah daerah. Ini sangat tidak elok untuk para tamu, terutama

wisatawan. Dan terakhir, tentu saja tidak terkelolanya pajak dan retribusi parkir.

Pada titik inilah pengelolaan parkir harus menerapkan strategi *total football*. Kenapa begitu? Karena parkir berkaitan dengan beberapa sektor, mulai dari pendapatan daerah, tata ruang, pariwisata, perhubungan, perdagangan, industri, hingga keamanan dan ketertiban umum.

Menertibkan parkir berarti memperlancar mobilitas orang dan barang. Kelancaran lalu lintas juga mempermudah peningkatan industri dan perdagangan. Keindahan tata ruang juga semakin mempercantik destinasi wisata. Sehingga tercipta rasa aman dan ketertiban umum, yang ujungnya mampu meningkatkan pendapatan daerah.

Namun demikian, pada saat yang bersamaan pengelolaan parkir juga harus menerapkan strategi parkir bus. Negara harus kuat meng-

hadapi berbagai dinamika pengelolaan parkir, seperti premanisme dan gangguan keamanan. Jika negara lemah, maka penertiban menjadi sesuatu yang mustahil.

Di sisi yang lain, parkir bus juga sangat berguna dalam menjaga pendapatan negara agar tidak bocor. Harus dibuat sistem yang rapih agar pajak dan retribusi parkir tidak tercecer dimana-mana. Negara harus punya mekanisme pertahanan yang kuat dari segala kebocoran.

Bagaimana caranya agar pertahanan parkir bus menjadi kuat? Semua sektor harus padu. Artinya, pada saat yang bersamaan penerapan parkir bus juga harus diimbangi dengan *total football*.

Sebagaimana juga keberhasilan Chelsea menjuarai Primer League pada musim 2014-2015. Mourinho yang berkesempatan menjadi pelatih Chelsea pada periode kedua justru menerapkan

parkir bus. Strategi yang sebelumnya ia kritik, justru ia gunakan untuk kembali menjadi juara.

Ini menunjukkan bahwa sejatinya pertahanan terbaik adalah menyerang. Dengan kata lain, pertahanan dan serangan terbaik adalah ke-terpaduan semua pemain dalam kesatuan tim. Jadi, kemena-ngan tercipta jika kita mampu menyerang dan pada saat yang bersamaan bertahan dengan baik.

Nah, untuk itu, agar parkir kendaraan tertib dan meningkatkan pendapatan daerah, kita harus *total football* dan parkis bus secara bersamaan. Jika kita mampu melakukannya, maka penonton (masyarakat) akan bahagia, semua sektor bahagia. Selamat menyambut Cirebon Bahagia.

CIREBON KATON • September 2022



Glatikan

Alunan dzikir subuh baru saja berhenti dari pe-ngeras suara masjid. Casta, sebut saja begitu, bergegas mendekati gerobak dagangan-nya. Tongkat bambu menumpuk di atas gerobak. Bendera merah putih berbeda ukuran berjejer rapih. Sebelum ia mendorong gerobak bersiap menjemput rezeki di bulan Agustus, saya menyempatkan menyapanya.

Selain tongkat dan bendera, ada barang dagangan lain yang menarik perhatian saya. Gangsing kayu dan gangsing bambu tergolek di salah satu sisi gerobak. “Ini kan bulan Agustus Pak, bulan permainan tradisional buat rakyat,” ujarnya.

Dengan semangat, ia

menyebutkan panjat pinang, tarik tambang, balap karung, bola api, hingga sampyong. Ia bahkan menyebutkan beberapa permainan tradisional lainnya. Sepertinya percakapan pagi itu menjadi ajang nostalgia masa kecilnya.

“Tapi sekarang tanah lapang tempat bermain anak

**Kalau mau
jadi pejabat
harus main
glatikan dulu jeh**



Kok bisa?



sudah jarang Pak,” ucapnya lirih. Ia bercerita tentang mainan kesukaannya waktu kanak-kanak: *glatikan*. Di beberapa daerah ada yang menyebutnya *toklean*, *patrekan* atau *janakan*.

Glatikan bagi saya juga menarik. Mainan ini penuh makna dan filosofi. Cocok untuk pejabat, aparatur pemerintah, atau siapa saja yang punya *eager* untuk kemajuan. Mari kita belajar dari *glatikan*.

Permainan ini sederhana. Alatnya hanya dua batang kayu berdiameter sekitar sebesar ibu jari. Satu batang panjang sekitar dua jengkal, batang yang kedua berukuran sekitar satu jengkal. Untuk itulah ia diberi nama *glatikan*, *gla* berarti jengkal, sedangkan *tik* adalah bunyi yang ditimbulkan ketika batang pertama memukul batang kedua.

Pemain pertama mengungkit batang kecil dengan batang yang lebih panjang dari lubang di tanah atau di-

antara dua batu bata. Ia lalu memukul batang yang terungkit. Tugas pemain kedua (bisa lebih dari satu), sebagai lawan main, menangkap batang yang terlempar akibat pukulan.

Batang kecil yang terlempar ini saya artikan sebagai masalah. Masalah yang dirasakan atau dialami masyarakat. Tugas pemain kedua adalah menangkap masalah ini. Jika dia tidak mampu menangkap, maka bisa dipastikan ia kesulitan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Tugas pemain kedua berikutnya adalah melemparkan batang yang sudah ditangkap itu agar kembali ke titik awal, ke titik pengungkit. Jika berhasil maka ia memenangkan permainan. Ini berarti ia sudah mampu menyelesaikan masalah publik.

Butuh kecermatan, kehati-kehatian, perhitungan matang, dan ketepatan dalam

melemparkan batang agar pas mengenai titik punggukit. Begitu pun ketika kita menyelesaikan masalah publik.

Jika batang itu tidak mengenai titik punggukit, maka pemain kedua dihukum menggondong pemain pertama. Ini bermakna, pejabat harus tetap menggondong masyarakat ketika upaya memecahkan permasalahannya belum sesuai target. Pemerintah harus tetap bersama masyarakat untuk terus bahu-membahu menyelesaikan segala masalah.

Jangan sebaliknya, menangkap masalah saja tidak. Acuh tak acuh, atau menyelesaikan persoalan sekadarnya saja. Pola pikir sebagai pemecah masalah (*problem solver*) dan memberikan layanan prima harus ditegakkan.

Jika masih mengalami kebuntuan, cobalah sejenak bermain glatikan. Agar kita bisa ingat dan terlatih menangkap

masalah dan memberikan solusi. Rasakanlah sesekali, betapa indahnya kita menggondong lawan (bukan musuh) permainan.

Mulailah juga berpikir, untuk menyelamatkan permainan tradisional, salah satunya melestarikan glatikan. Selamatkanlah dunia bermain anak-anak, dengan memfasilitasi ruang bermain ramah anak (RBRA) untuk mereka mengasah rasa, olah pikir, dan ketangkasan dalam menyelesaikan masalah hidup. Selamat melahirkan generasi *problem solver*.



Buta Data Desa

Banyak yang mengatakan: “Jika ingin membangun sebuah kabupaten, maka bangun-lah desa.” Ada benarnya, namun dalam beberapa aspek, juga butuh pembenahan di tingkat, kecamatan, kabupaten, dan interkoneksi dengan provinsi dan pusat.

Tapi tetap mulailah dari desa Kang,” ujar beberapa rekan. Tentu saya setuju, namun lagi-lagi ketika proses penyusunan anggaran (APBD), kami sering dihadapkan pada minimnya data pendukung tentang desa. Terutama data yang menjadi landasan kenapa harus membuat program dan menganggarkannya.

Data yang tersedia tidak *update*, alias data lama.

Kadang hanya perkiraan. Bahkan, ada yang lebih parah, desa tidak memiliki data. “Ganti kuwu, ganti perangkat, semua data entah kemana, mungkin dibawa perangkat yang lama. Tak hanya itu, formulir atau format dokumen untuk pelayanan masyarakat saja tidak ada, perangkat baru harus buat lagi,” begitu ce-rita yang mengiringi pembangunan desa.



**Bagaimana membangun
desa agar katon,
kalau kita sendiri buta
akan data desa**



Jika kondisinya seperti itu bagaimana kita bisa membangun? Bukankah pembangunan itu harus berpondasikan pada data dan kondisi aktual yang akurat? Sulit juga rasanya membuat perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan pemerintah membuat Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebenarnya cukup ideal. Dimana peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat berkesinambungan, juga bisa menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Bagaimana bisa kita akan memberikan jaminan kesehatan dan sosial yang menyeluruh dan tepat sasa-

ran, jika kita tidak tahu siapa saja yang membutuhkan? Jangan sampai kabupaten memberikan anggaran untuk penjaminan yang besar, namun sejatinya kita tidak tahu siapa saja yang dijamin di masing-masing desa.

Bagaimana mungkin kita akan meningkatkan angka lama sekolah, sementara kita tidak pernah tahu siapa saja yang putus sekolah? Data statistik menunjukkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Cirebon hanya 7 tahun. Benarkah? Kalau benar, siapa saja yang putus sekolah? Di desa mana saja? Alamatnya?

Bagaimana bisa kita memberikan pelayanan prima pencetakan KTP, sementara kita tidak tahu siapa saja di tiap desa yang belum memiliki KTP? Berapa rata-rata kebutuhan cetak KTP per bulan per desa akibat hal-hal yang tidak terduga, misalnya hilang atau rusak?

Data statistik menunjukkan angka pengangguran ter-

buka di Kabupaten Cirebon 11,52 persen (2020), namun siapa saja mereka? Tingkat pendidikan mereka seperti apa? Keterampilan atau *skill* mereka seperti apa?

Dari data itu, tentu kita bisa menyusun langkah-langkah pengentasan pengangguran di tiap desa. Tentu ini juga berkaitan dengan data potensi ekonomi desa apa yang bisa diberdayakan? Cukupkah dengan mendirikan dan menguatkan Bumdes? Bagaimana program UKM, kawasan industri, dan pengembangan pariwisata menjawab itu semua?

Bagaimana dengan pertanian menjawab permasalahan ekonomi? Berapa lahan produktif yang tersedia? Berapa dan siapa petani penggarap, serta kebutuhan tenaga kerja? Bisakah diselesaikan dengan program petani milenial, atau mesinisasi?

Belum lagi soal berapa ton kebutuhan pupuk di tiap desa? Berapa kebutuhan irigasi pertanian di tiap desa?

Sehingga kita dengan yakin bisa membuat langkah-langkah alternatif pemenuhan pupuk dan pembuatan waduk di tiap-tiap daerah.

Di sektor kelautan pun demikian? Berapa jumlah nelayan? Sejauh mana kemampuan dan teknologi yang digunakan nelayan? Mungkin-mungkinkah kita membuat program penyediaan kapal besar diatas 30 GT, atau 200 GT? Bagaimana pengelolaan hasil lautnya?

Pertanyaan-pertanyaan itu tentu harus kita jawab dan akan terjawab jika kita memiliki data yang akurat di tiap-tiap desa yang selalu *ter-update*. Saatnya- kita membuat sistem data terpadu (*single data system*) yang berbasis desa.

Sehingga kita bisa membangun bukan atas dasar kebutaan data. Bagaimana mungkin kita membangun Cirebon agar *katon*, jika kita sendiri buta akan Cirebon?

CIREBON KATON • Juli 2022



Tol Pelayanan

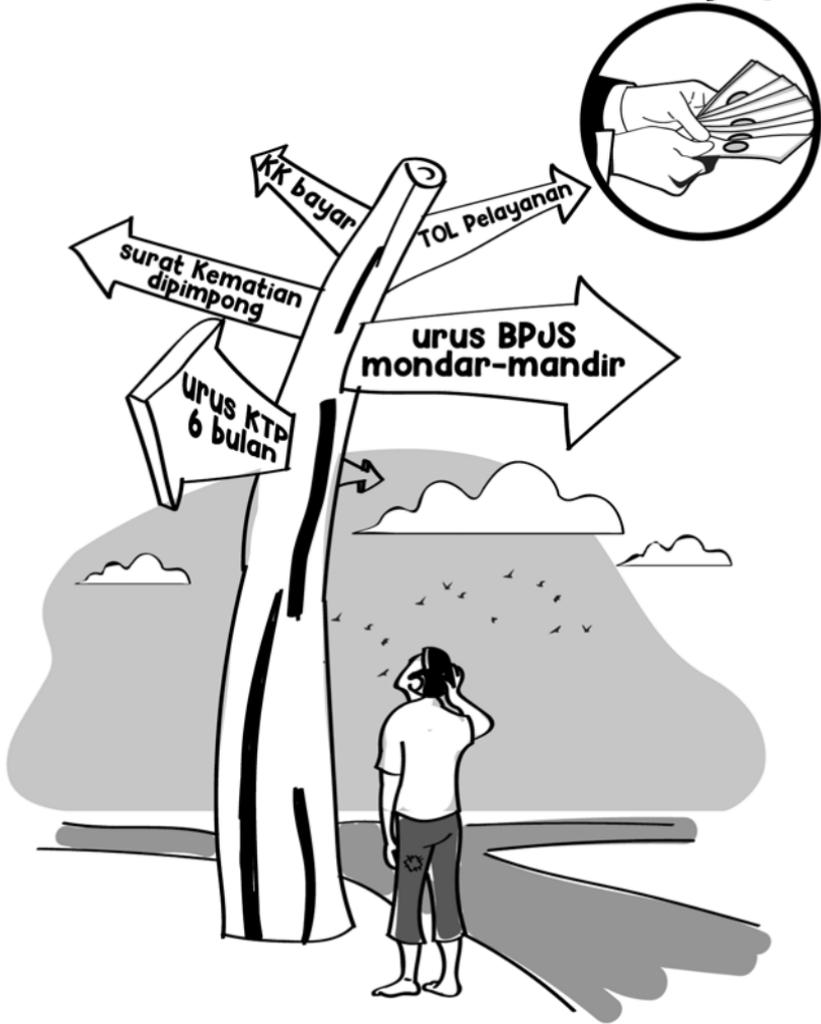
Dalam sebuah kunjungan ke desa, seorang warga, sebut saja namanya Mang Casta, bercerita. Saya mendengarkannya dengan seksama. Meski sebenarnya kisah sejenis bukan kali pertama saya dengar. Tapi tetap saja selalu menggelitik.

Kang, waktu saya ingin membuat KTP, prosesnya lama dan berbelit. Alasannya blangko kosong, antri, mesin cetak terbatas, macam-macam lah.... Katanya kalau pengajuan normal bisa tiga bulan, kalau bayar bisa sebulan, kalau mau jalan tol dua hari juga bisa, tapi ba-

yanya lebih mahal lagi," begitu kurang lebih ia bercerita.

Tak hanya menggelitik sebenarnya, cukup menyesak-kan juga. Bagaimana tidak, di era teknologi informasi, di tengah semangat zaman yang berubah begitu cepat, hal itu masih terjadi.

Hampir semua lini ke-



**Jangan yang berduit aja
yang dapat tol pelayanan**



hidupan kini sudah dimanjakan dengan kemudahan teknologi. Di bidang ekonomi, ada *e-commerce*, *e-banking*, dan *e-trading* yang sudah begitu akrab dengan masyarakat.

Pergerakan manusia dan barang pun sudah berbasis teknologi. Teknologi *geo information system* (GIS) dan *global positioning system* (GPS), seperti gmap dan waze, sudah lekat dalam keseharian. Bahkan gojek dan grab sudah memadukannya fungsi GIS dan GPS dengan transaksi ekonomi (*e-commerce*). Lagi-lagi, orang kampung pun sudah terbiasa dengan aplikasi ini.

Di bidang pendidikan sudah ada *e-learning*. Bahkan kini ada universitas yang hanya membuka kelas daring (*online*). Di bidang kesehatan sudah ada *e-doctor*. Dengan aplikasi orang sudah bisa berkonsultasi dengan dokter dan mendapatkan resep obat.

Di bidang pertahanan negara dan keamanan

masyarakat pun sudah menerapkan teknologi informasi. Polisi siber beberapa kali diberitakan unjuk gigi menegungkap kejahatan. Ini sekaligus membuktikan bahwa kejahatan dan kemaksiatan pun sudah berbasis teknologi informasi.

Jika teknologi sudah semakin pintar (*smart*), masyarakat dan lingkungan pun demikian, bagaimana dengan pemerintahan? Bagaimana dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat?

Jika kita sudah menerapkan *e-government*, tentu saja kisah Mang Casta di atas tak akan terjadi. Tidak ada lagi cerita pelayanan jalur normal, jalur arteri, dan jalur tol. Harusnya semua pelayanan adalah pelayanan jalan tol. Lancar, cepat, praktis, dan bahkan bisa gratis.

Pemerintah daerah di semua lini harus membuat tol pelayanan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan

dasar masyarakat, seperti KTP dan KK. Saatnyalah, pola pikir insan pemerintahan bertransformasi untuk terus meningkatkan pelayanan, bukan meningkatkan 'pendapatan' pribadi.

Saatnyalah organisasi pemerintahan berkomunikasi aktif dengan masyarakat sebagai pelanggan. Kepuasan masyarakat harus senantiasa diukur, dan dijadikan indikator kinerja. Masyarakat harus diberikan akses untuk menyampaikan keluhan. Mekanisme pelaporan disusun dan dilaksanakan dengan rapih dan konsisten, sehingga tersusun *standar operating procedures* (SOP) yang baku.

Tentu saja semuanya itu harus berbasis teknologi informasi. Sarana dan prasarana harus secara masif dibangun di setiap lini pemerintahan, baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Harus ada satu data kemasyarakatan (*single data system*).

Tak ada lagi kisah data tidak sinkron antar-lini atau antar-bidang pemerintahan.

Tak ada lagi kisah tidak ada blangko. Teknologi informasi menyediakan blangko yang tidak terbatas. Tinggal klik dan isi, kapanpun, dimanapun. Sehingga semua tol pelayanan pun tersedia untuk semua jenis layanan kemasyarakatan.

Tentu saja, juga tidak ada lagi diskriminasi pelayanan. Hanya yang berduit yang mendapatkan layanan prima. Jika semua tol pelayanan itu sudah tersedia, maka disitulah Cirebon Bahagia.



Sportif

Banyak orang beranggapan bahwa 'di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat'. Biasanya sambil mengutip ucapan pujangga Romawi Abad Kedua, Decimus Iunius Juvenalis: *Mens sana in corpore sano*. Ada benarnya, tapi menurut saya kurang lengkap, terutama dalam konteks pembinaan olahraga.

Kita sering menyaksikan atau membaca di media tentang karut-marut pembinaan olahraga. Rame (ribut) mulu tapi nol prestasi. Kalau pun ada prestasi, ujungnya ribut juga. Ribut saling klaim peran: 'sayalah yang membuatnya berprestasi'.

Saling klaim itu lalu

menghasilkan cibiran masyarakat, dan biasanya berakhir saling menyalahkan antar pengurus atau pejabat. Kemudian menguap begitu saja. Karut-marut pun tetap menjadi benang kusut, tanpa perbaikan pembinaan.

Hingga muncul letupan prestasi berikutnya, lalu



**Giliran kalah aja,
nyalain anak buah.
Sportif bro biar Bahagia**



klaim lagi, ribut lagi. Begitu seterusnya bak lingkaran tak berujung. Pertanyaanya mau sampai kapan begitu terus?

Bicara olahraga (*sport*) tak bisa dipisahkan dari sifat-*sport*, atau sportif. Inilah jiwa olahraga. Jika olahraga kehilangan sportivitas, maka yang terjadi bisa berupa klaim peran pribadi masing-masing. Pribadi di sini bisa atlet, pelatih, pembina, pengurus lembaga olahraga, suporter, bahkan bisa pejabat.

Sportivitas tidak hanya harus terjadi di lapangan pertandingan atau arena olahraga. Tapi jauh sebelum itu, harus dijunjung tinggi para pengurus dan pejabat. Sportif membina. Sportif akan kementa-ngan, juga sportif atas kekalahan.

Serius membina sepenuh jiwa, jangan lengah dan lelah memberikan dukungan. Sehingga ketika atlet binaan berprestasi, tanpa perlu sibuk mengklaim. Publik akan den-

gan sendirinya menilai bahwa para pengurus dan pejabat telah bekerja dengan baik.

Jiwa sportif akan melahirkan pribadi *fair-play*, baik di dalam lapangan, luar lapangan, maupun dalam konteks pembinaan olahraga. Jika sebaliknya, tanpa sportivitas, maka olahraga kehilangan jiwa. Tidak adanya *fair-play* dalam lapangan maupun dalam pembinaan.

Kalau sudah demikian, lembaga olahraga sudah menjadi ajang benturan berbagai kepentingan. Sehingga karut-marut di atas tak akan bisa terselesaikan. Lahirnya atlet-atlet berprestasi, atau mempunyai klub sepakbola yang membanggakan, hanya mimpi belaka.

Mari bayangkan, bagaimana mungkin kita melorokan atlet-atlet berprestasi berjiwa ksatria, sportif, dan *fair-play*, jika mereka berada di lingkungan yang sebaliknya. Jika visi ini sudah tertanam

dalam semua insan olahraga, baru berikutnya kita bicara mengenai sarana, prasarana, dan aplikasi teknologi.

Di daerah lain, terutama di luar negeri, sudah memantapkan diri dengan pencetakan atlet berbasis *sport science*. Pembinaan dengan menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Olahraga bukan lagi sekadar hobi dan kegiatan sampingan.

Jika sudah begitu, cita-cita olahraga yang mensejahterakan para insan olahraga dapat terwujud. Tak ada lagi keraguan tentang masa depan para atlet. Tak hanya itu, olahraga bahkan dapat mensejahterakan lingkungan sekitarnya. Olahraga pun dapat menjelma menjadi wisata dan industri.

Ujungnya, olahraga dapat memberikan sumbangsih pada PDRB dan PAD sebuah daerah. Ia bisa menjadi motor pembangunan ekonomi, yang

dapat bergandengan tangan dengan wisata, industri, dan dan UKM.

Olahraga tidak hanya menyehatkan badan dan menguatkan jiwa, tapi juga sehat dan kuat secara ekonomi. Syaratnya, ia harus dibangun dengan ruh olahraga itu sendiri: sportif. Jadi adagium di atas perlu ditambahkan, menjadi: "Dengan jiwa sportif melahirkan pikiran dan tubuh yang sehat, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat." Mari sportif, maka bahagia.



Rasa Kota, Rasa Desa

Beberapa bulan lalu, seorang sahabat berkunjung ke Cirebon. Saya menjemputnya di Stasiun Kereta Api Kejaksan. Sepanjang jalan menuju Sumber, obrolan mengalir begitu saja. Hangat, sesekali diselingi canda gurau. Begitu sampai di kediaman kami, ia tampak terkejut.

Bro, ini kita sudah di Sumber?" tanyanya. Saya hanya mengangguk sembari tersenyum dan sedikit mengangkat alis mata. "Kok *gak* terasa yah kalau kita sudah memasuki ibukota kabupaten," untkannya. Belum juga saya tanggapi, ia kembali berujar "Perasaan tadi tidak

ada tanda-tanda atau tata kota yang menunjukkan kita sudah memasuki Kota Sumber."

Saya hanya tertawa. Untung dia tidak menyebut kata: semrawut, kumuh, atau ruwet. Mudah-mudahan bukan karena dia tidak enak mengungkapkannya saja. Apapun itu, yang jelas dia



**Kota itu harus
berasa desa: asri.**

**Desa itu harus
berasa kota:
sarana lengkap**



tidak me-ngungkapkan sesuatu yang negatif. Sepertinya hanya 'rasa kota' yang ia tidak temukan ketika memasuki Sumber.

Rasa kota tentu penting bagi wilayah yang memiliki predikat ibukota kabupaten. Tanpa itu, bak sayur asem tanpa garam. Tiada asin, tiada gurih, alias cemplang dan hambar. Jika itu yang dirasakan tamu yang berkunjung ke Sumber, maka mari kita kaca diri: benarkah demikian?

Dulu, rasa kota identik dengan keramaian, hiruk pikuk ekonomi, bangunan modern nan permanen, lengkap dengan sarana dan prasarana. Kini rasa kota mulai bergeser pada ketertaaan semua lini kehidupan, kelengkapan sarana, bersih, nyaman, dan 'rasa desa', yakni asri serta banyak area hijau.

Jika melihat Soreang, Ibukota Kabupaten Bandung, rasa kota itu lebih terasa dibanding Sumber. Kenapa memband-

ingkan dengan Soreang? Karena keduanya dalam era yang sama berdiri sebagai ibukota baru kabupaten.

Sumber resmi menjadi ibukota Kabupaten Cirebon berdasarkan PP Nomor 33/1979, dan ditempati sebagai ibukota pada 1988. Soreang ditempati sebagai ibukota Kabupaten Bandung pada 1990 (sebelumnya di Baleendah). Artinya secara waktu sama, bahkan Sumber dibangun lebih dahulu. Tapi kenapa Soreang lebih memiliki rasa kota?

Pertanyaan itu bukan untuk masa lalu, tapi tantangan untuk masa yang akan datang. Untuk itu, mari kita bangun Sumber agar mewujudkan menjadi ibukota kabupaten yang sesungguhnya. Sehingga, bukan hanya melahirkan *wow* bagi para tamu, tapi juga membuat warga ibukota bahagia.

Selain ibukota kabupaten, bagaimana de-ngan

desa? “Sepertinya sudah kehilangan desanya, sam-pah dimana-mana,” celetuk sang kawan ketika saya ajak menelusuri beberapa desa. “Ini sebenarnya desa apa kota?” ucapnya lagi.

Pertanyaan itu tidak saya jawab. Saya memahami bahwa pertanyaan itu sebenarnya hanya meng-hindari perkataan bahwa ‘desa kok kumuh’. Ini semakin menguatkan tekad bahwa dalam waktu dekat Kabupa-ten Cirebon harus segera bebas sampah.

Selain itu, pertanyaan sang kawan juga mengi-ngatkan tentang konsep ideal pedesaan ke depan. Bahwa desa di masa yang akan datang adalah desa yang memilki ‘rasa kota’. Desa yang tetap mempertahankan ciri khas kedesaannya, yakni asri, hijau, dan sejuk; namun memilki rasa kota, yakni tersedianya fasilitas dan sarana prasarana seperti layaknya kota.

Jika hari ini di Kabupaten Cirebon belum tersedia fasilitas pengelolaan sampah di tingkat desa, bahkan di kota, maka jangan harap memiliki Sumber sebagaimana layaknya ibukota kabupaten. Kota yang memilki rasa desa. Juga, jangan harap dapat mewujudkan desa yang asri dengan rasa kota.

Betul bahwa tidak semua desa berwajah tak jelas. Tentu, desa yang sudah berasa kota harus kita apresiasi. Desa yang lainnya mari kita bangun bersama. Mulailah dengan melihat secara lapang, dan membangun visi bersama: desa rasa kota, dan kota rasa desa. Disitulah Cirebon bahagia.



Laron, Apa Lebah?

Seruputan pertama kopi pagi membasahi tenggorokan. Obrolan pun mengalir. Ringan. Meski kadang-kadang berat juga. Tiba-tiba seorang sahabat bertanya: "Kang nggak nulis soal laron lagi?"

Aha...rupanya sang kawan masih ingat tulisan saya beberapa bulan lalu mengenai laron. "Nggak," jawabku singkat. Ekspresi wajahnya menyiratkan ketidakpuasan atas jawabanku. "Sekarang lagi suka lebah," jelasku, sedikit mengurangi kepenasarannya.

Ia pun langsung mengejar

jawabanku, dengan berselero-roh: "Ini pasti karena..."

Belum selesai ia melengkapi kalimat itu, langsung saya potong: "Karena banyak orang mengaku berfilosofi lebah namun kelakuannya seperti laron," sergahku.

Ingat, ketika di petang hari laron keluar dari sa-

Untuk berkuasa kok
kamu tega membunuh
para saudaramu
sendiri ron?

Ini kompetisi bro,
daripada kamu,
beraninya keroyokan





rangnya, kemudian menuju sumber cahaya, itulah saatnya laron unjuk kekuatan. Demi meraih cinta sang ratu dia rela membiarkan ribuan saudara sekandungnya mati bergelimpangan.

Demi membuat sebuah kerajaan (koloni) baru, ia mencabik-cabik persaudaraan sekandung. Ia khianati persatuan dan kesatuan bangsa koloninya, ha-nya demi sang betina dan takhta barunya.

Bandingkan dengan lebah. Setelah satu tahun, sesuai daur hidupnya, lebah ratu akan melahirkan beberapa generasi baru ratu. Ratu yang paling cakap-lah yang akan melangsungkan memimpin koloni lamanya, sedangkan ratu-ratu lainnya akan membuat koloni baru dengan membawa beberapa lebah pekerja.

Sama dengan laron, dalam koloni lebah juga ada kompetisi. Bedanya, di koloni laron terjadi kompetisi saling

membunuh. Sedangkan di koloni lebah terjadi kompetisi yang sehat, hidup bersama, membahu dan berlomba dalam kebaikan, memberikan manfaat bagi tumbuhan dan manusia.

Di hutan, dalam satu pohon yang rimbun dan hijau, masing-masing koloni hidup damai dalam beberapa cabang. Menggelantung membentuk harmoni. Mereka teratur dalam satu cabang, maupun dalam satu pohon. Jika ada yang mengusik salah satu cabang, lebah satu pohon itu bisa menyerang sang pengganggu.

Ada pelajaran yang menarik dari laron dan lebah ini. Dalam ber-organisasi, ber-lembaga, atau ber-negara, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang merajut harmoni, memaksimalkan potensi, dan melahirkan generasi-generasi unggul.

Lihatlah lebah, ia mencari sesuatu yang kecil, berupa

nektar dan tepung sari, namun tanpa merusak bunga. Bahkan menguntungkan bagi pohon, karena membantu proses pembuahan.

Setelah itu lebah memproduksi dan menyimpan madu, makanan unggul (*superfood*) yang bersih, sehat dan lezat bagi manusia. Artinya dari potensi yang begitu kecil ia ubah menjadi sesuatu yang luar biasa besar manfaatnya. Itulah pemimpin sejati.

Sebaliknya, jika pemimpin itu rela mencabik-cabik persatuan dan membunuh saudaranya sendiri demi kekuasaan (seperti laron), maka (biasanya) koloninya pun tidak akan lama bertahan. Dalam konteks inilah, lebah lebih baik daripada laron.

"Terus Kang Luthfi *pengen* jadi lebah *gitu*?" Ujar sang kawan, tiba-tiba nyeletuk. "Kalau saya, ya jadi manusia saja, yang meniru sifat baik laron dan lebah," jawabku singkat.

"Lantas bagaimana Kang, kalau ada yang berbaju lebah namun aslinya laron?" Sang kawan menimpali. "Mana ada lebah begitu, itu sih namanya lebah kardus, alias wedhus gondrong, yang hanya ada dalam komik."

"Eit... Jangan salah, ada kok manusia yang sukanya merusak sistem, menghancurkan persatuan, dan membunuh potensi, hanya demi kekuasaan dirinya semata," jelasnya gak mau kalah. "Hemm..., iya juga sih, tapi itu kan manusia, bukan lebah." Seruput dulu *bro*....



Mencari Ruang Keseriusan

Jika bertanya pada pemerintah daerah: sudah seriuskah membangun atau memajukan daerahnya? Jawabannya pasti serius, bahkan serius 3.000 kali. Apalagi jika bertanya kepada calon pemimpin daerah (yang kini sedang bersiap-siap), jawabannya bisa: serius 10.000 kali.

Tapi benarkah keseriusan itu berupa ucapan dengan penekanan angka kali lipat? Saya sih tidak begitu yakin. Untuk itu, mari kita cari ruang keseriusan itu ada dimana?

Hari ini, di penghujung 2021, kita menyadari bahwa Kabupaten Cirebon sudah ter-

tinggal dibanding kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Data statistik menunjukkan bahwa angka pengangguran kita tertinggi se-Jawa Barat, mencapai 11,52 persen (pada 2020). Angka ini jauh di atas angka kemiskinan Jabar (10,46 persen), dan nasional (7,07 persen).

SAMPAN



PENGAGURAN



BANJIR

Lagi cari
apa Kang?



Mencari keseriusan
pembangunan



Prosentase kemiskinan di Kabupaten Cirebon masuk lima besar Jabar. Pada 2020 merosot tajam di angka 11,24 persen. Lagi-lagi jauh di atas rata-rata kemiskinan di Jabar (7,88 persen) dan nasional (9,78 persen).

Mari kita teropong lebih detil, pada ruang-ruang upaya menuntaskan pengangguran/kemiskinan itu. Dari sisi industri, sudahkah Cirebon membangun kawasan industri? Tak perlulah membandingkan dengan Bekasi atau Karawang. Lihatlah tetangga dekat, Brebes, kini sudah memiliki Kawasan Industri Brebes (KIB) dan terus mengembangkannya.

Salah satu yang dibangun Brebes adalah menyiapkan industri yang mendukung kebutuhan KIB, salah satunya garam industri. Tahun ini Brebes sedang membangun pabrik garam industri berkapasitas 50 ton per hari dengan anggaran Rp 80 miliar.

Padahal lahan tambak garam Brebes hanya 1.456 hektare, kalah dengan Cirebon yang memiliki 1.557 hektare. Namun, tampaknya Brebes lebih serius memberdayakan potensi daerahnya. Kemampuan para petambak Cirebon hanya 7,3 ton per hari.

Potensi lainnya soal hasil laut, PAD dari 7 tempat pelelangan ikan (TPI) di Kabupaten Cirebon pada 2020 hanya Rp 27,9 juta. Kalah dengan satu TPI di Kejawanan (Kota Cirebon) yang mencapai Rp 1,1 miliar. Lebih kalah lagi jika dibandingkan dengan TPI Karangsong (Indramayu) yang memberikan PAD hingga Rp 10,5 miliar.

Bagaimana dengan pariwisata? Potensi wisata di Kabupaten Cirebon juga luar biasa. Setiap hari ada 2.500 wisatawan yang mengunjungi Gunung Jati. Namun mereka tidak lebih dari 3 jam berada di Cirebon.

Tidak ada *staying power*,

sesuatu yang membuat wisatawan berlama-lama di Cirebon. Apakah mereka tidak nyaman? Banyak sampah? Banyak penge-mis? Kemanakah destinasi wisata lainnya? Sudahkah infrastruktur memadai?

Jika masih banyak tanda tanya, lantas dimanakah ruang keseriusan itu? Apakah keseriusan itu hanya cukup diucapkan saja? Ataukah memang ngumpet, kalah dengan ambisi memperkaya diri?

Sampai disini rasanya cukup untuk terus mencari ruang keseriusan. Seperti-nya tidak akan membuahkan hasil. Tidak ada gunanya. Bahkan bisa berujung saling menyalahkan. Kenapa?

Karena keseriusan itu bukan untuk dicari di masa lalu. Keseriusan itu harus dibangun oleh kita hari ini, mulai saat ini. Kita takkan pernah menemukan keseriusan kalau bukan kita yang membangunnya.

Hakikat pembangunan

berbasis kewilayahan adalah menuntut kita serius dan fokus pada sumber daya dan komoditi unggulan yang ada. Sebesar apapun potensi yang ada, jika tanpa keseriusan ia takkan berarti apa-apa.

Sebaliknya, meski potensi itu kecil, jika kita serius dan terus membangun keseriusan itu, maka hasil tak akan mengkhianatinya. Lihatlah Jepang, negara yang tak memiliki lahan layak pertanian, karena keseriusannya, sukses bertani dan melahirkan teknologi-teknologi baru pertanian.

Jadi, jika kita mencari ruang keseriusan, maka jawabanya ada pada diri sendiri. Ada pada setiap pribadi manusia Cirebon. Jika setiap pribadi serius, maka buka lagi ruang yang kita temukan, namun gedung bahkan istana keseriusan.

CIREBON KATON • Desember 2021



Kalah Garam

Kita kerap mendengar atau mungkin berkata 'banyak makan (asam) garam' atau 'membuang garam ke laut.' Kata garam dalam peribahasa itu diartikan sebagai: pengetahuan, ilmu, atau pengalaman. Tapi bagaimana dengan ungkapan 'kalah garam' atau 'kalah uyah'?

Bisa jadi artinya sama dengan peribahasa tersebut, bisa juga berarti garam yang sesungguhnya. Nah, dua makna itu sepertinya kini sedang menimpa Kabupaten Cirebon. Kok bisa? Bisa tentu saja, bahkan sudah dan sedang terjadi.

Anda boleh setuju, boleh

tidak. Mari kita lihat fakta saja. Potensi produksi garam di Kabupaten Cirebon cukup besar, terdapat lahan tambak garam seluas 1.557 hektare. Membentang dari Kapetakan hingga Losari.

Pada 2020, total produksi garam di Kabupaten Cirebon hanya 2.670 ton. Berarti ke-

Kabupaten A maju



Kabupaten B bangkit



Kabupaten C kaya

**Kabupaten
Cirebon
dimana,
gak kelihatan?**

**Kabupaten Cirebon
kalah uyah Jeh**



Mohamad Luthfi

mampuan satu hektare lahan rata-rata hanya menghasilkan 1,72 ton dalam setahun.

Sungguh angka yang kecil. Padahal pada 2015 sempat mencapai angka 435.000 ton per tahun. Aktivitas petambang garam yang berjumlah 3.020 itu pun terus merosot, dari 120 kelompok usaha garam (kugar), kini hanya 37 kugar yang aktif.

Sangat disayangkan. Padahal kebutuhan nasional akan garam cukup tinggi. Data Kemendag menunjukkan bahwa pada 2021, total kebutuhan garam nasional sebesar 4.606.554 ton. Sementara kemampuan produksi nasional hanya 1.528.653 ton.

Artinya hanya sepertiga yang mampu dipenuhi produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional, sisanya masih impor. Jelas ini peluang usaha yang sangat besar. Juga peluang pemerintah daerah untuk menggenjot produksi, demi meningkatkan

taraf ekonomi lokal.

Menyadari akan besarnya kebutuhan pasar itu, Kabupaten Pamekasan pada 2018 merangkul perguruan tinggi setempat mengembangkan teknologi pengolahan garam. Bersama Universitas Trunojoyo Madura, Pemkab berhasil meningkatkan produksi garam tiga kali lipat. Waktu produksi pun bisa dipersingkat biasanya 8-10 hari, dengan teknologi terapan hanya butuh waktu 3-4 hari saja.

Pada tahun 2020, dengan lahan yang hanya 913,5 hektar, Kabupaten Pamekasan mampu menghasilkan 30.726 ton. Rata-rata per hektar bisa memproduksi 30 ton. Sungguh angka yang jauh jika dibandingan dengan Kabupaten Cirebon yang hanya 1,7 ton per hektar.

Peluang emas bisnis garam juga ditangkap Kabupaten Brebes. Pada 2021 mengalokasikan investasi sebesar Rp 80 miliar untuk membuat

pabrik pengolahan garam standar industri. Pabrik ini berkapa-sitas 30-50 ton per hari.

Menariknya, pembuatan pabrik pengolahan garam standar industri itu untuk memenuhi kebutuhan garam di Kawasan Industri Brebes (KIB). Artinya pemerintah Kabupaten Brebes merencanakannya secara terintegrasi.

Selain itu, di tingkat petambak, Pemkab Brebes pun menerapkan teknologi *washing plant* untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi petambak. Dari sisi luasan lahan, di Brebes hanya 1.456 hektar, dengan jumlah petambak garam sebanyak 658 orang.

Dari sisi potensi luasan lahan dan jumlah petambak, Kabupaten Cirebon tentu saja unggul diban-ding Pamekasan dan Brebes. Namun, kenapa Kabupaten Cirebon masih kalah garam, dari sisi kuantitas dan kualitas produksi?

Jawabnya, karena Kabupaten Cirebon masih 'kalah garam', yakni kalah pengetahuan, kalah tek-nologi. Pengetahuan dan teknologi, di era keterbukaan informasi saat ini, sebenarnya bukanlah hal yang sulit didapat.

Masalahnya adalah kemampuan kita membaca angka, data, potensi, dan peluang yang ada. Kemampuan ini akan semakin terdongkrak jika kita punya perhatian yang besar untuk memajukan Cirebon dari berbagai sisi. Mari kita lakukan bersama. Ini prasyarat dasar. Sehingga ke depan, tidak ada lagi cerita 'kalah garam' bagi Kabupaten Cirebon.



Rasa Wisata

Wisata itu soal rasa. Jadi, jangan pernah bica-ra soal membangun pariwisata, jika belum memahami dan mengenali rasa. Tidak usah berniat menata pariwisata, jika tak memahami nilai di balik rasa. Ini serius, pake banget.

Kenapa? Karena rasa itulah yang ingin dinikmati wisatawan. Untuk itu, rasa jugalah yang seharusnya dipersembahkan oleh para pengelola destinasi wisata.

Mari kita cek apa saja yang diharapkan wisatawan. Bisa juga silahkan tanya pada diri sendiri: Apa yang Anda

inginkan ketika berwisata? Relaksasi dan merasakan keindahan untuk wisata alam; merasakan keunikan untuk wisata seni dan budaya; merasakan kenikmatan untuk wisata kuliner, ketegangan dan pengalaman baru untuk wisata yang menantang dan petualangan; dan rasa keberi-





manan untuk wisata religi.

Di balik rasa itu ada nilai: yakni nilai keindahan, nilai keunikan karya dan seni, nilai keluhuran budaya, nilai religi, nilai sejarah, dan nilai kebaruan. Rasa dan nilai itulah yang juga sebenarnya 'dijual' oleh pelaku pariwisata.

Ketika seorang pengrajin membuat sebuah to-peng, dia tidak hanya menyuguhkan seongkok kayu yang telah dipahat kemudian diwarnai dengan cat. Di balik pahatan bongkahan kayu itu ada nilai yang dijual: seni, filosofi, keunikan, budaya, hingga keindahan dan kehalusan karya.

Namun, apakah rasa dan nilai itu saja cukup? Tidak. Orang yang berwisata adalah orang yang sehat secara jasmani, jiwa, dan ekonomi. Dengan kondisi seperti itu, mereka membutuhkan kenyamanan dan pelayanan yang sempurna ketika berwisata.

Jika kenyamanan men-

gusik mereka dalam berwisata, maka rontoklah segala kesempurnaan nilai dan rasa yang diunggulkan sebuah destinasi. Seja-tinya, kenyamanan dan pelayanan juga merepresentasikan rasa.

Jadi, disamping rasa yang yang menjadi kekhasan destinasi, dibutuhkan juga rasa yang bersifat lebih umum dan menjadi fondasi semua rasa, yakni kenyamanan dan kesempurnaan pelayanan.

Sekarang mari kita cek pariwisata di Kabupaten Cirebon. Saya sering mendapat *complain* dari para sahabat dan tamu yang berkunjung: Kabupaten Cirebon kumuh, sampah berserakan dimana-mana.

Secara umum, orang datang ke Kabupaten Cirebon sudah merasa tidak nyaman karena sampah. Ketika tiba di Cirebon disambut sampah, maka sulit rasanya menumbuhkan keinginan di benak tamu bisa berlama-lama di

Cirebon.

Wajar jika data menunjukkan okupansi (lama menginap) di hotel para wisatawan di Cirebon sangat rendah. Sedikit orang yang ingin berlama-lama di Cirebon.

Bagaimana dengan destinasi unggulan di Kabupaten Cirebon, misalnya kawasan Gunung Jati? Saya sering mendapat keluhan soal banyaknya penge-mis yang cenderung memaksa meminta-minta. Betul bahwa kita diwasiasi untuk bersedekah, namun tentu dengan cara-cara yang lebih beradab dan dibenarkan secara syariat, bukan dengan memaksa.

Memaksa jelas membuat pengunjung tidak nyaman. Bahkan, beberapa orang merasa jengkel, akibatnya merusak kehikmatan dan kesahduan berziarah.

Padahal, pada 2019 (sebelum pandemi) ada sebanyak 850 ribu wisatawan mengunjungi Gunung Jati. Jika

direrata, per bulan ada 70 ribu pengunjung.

Sebagai pintu masuk wisatawan di Kabupaten Cirebon, tentu itu angka yang luar biasa. Jika mereka nyaman, tentu peluang memperlama tinggal di Cirebon menjadi besar. Apalagi jika mereka bisa dia-rahkan mengunjungi destinasi yang lain, maka akan memberikan sumbang-sih yang besar bagi ekonomi Cirebon.

Pertanyaannya, jika sampah berserakan, dan praktik pengemis memaksa minta-minta berlangsung bertahun-tahun, kemanakah rasa manusia Cirebon? Kemanakah nilai adiluhung yang selalu dibanggakan manusia Cirebon? Benarkah kita sudah mati rasa dan kehilangan nilai?



Membelakangi Laut

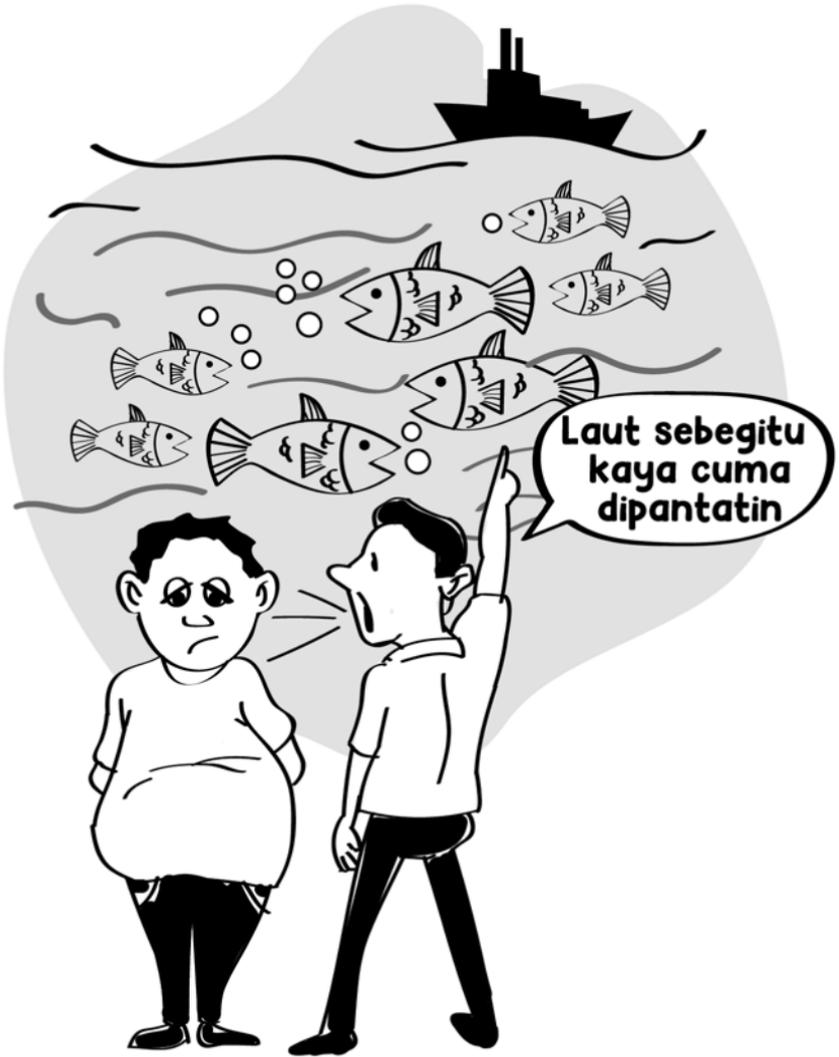
Ini bukan soal Indonesia. Ini cukup Kabupaten Cirebon saja --meski, bisa jadi Indonesia juga. Di laut yang kaya, nelayan Kabupaten Cirebon (dan Cirebon sebagai Kabupaten) masih miskin. Kenapa? Kualat, bisa jadi. Kok Bisa?

Jawabannya, karena kita telah membelakangi laut. Bahkan, bisa jadi telah melupakan laut. Benar-kah? Mari kita cek dengan melihat fakta berikut.

Panjang garis pantai Kabupaten Cirebon mencapai 77,97 kilometer. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor

23/2014 bahwa batas maksimal wilayah laut provinsi sejauh 12 mil laut, dan batas bagi hasil kelautan kabupaten/kota maksimal sejauh 4 mil laut (6,4 KM).

Dengan demikian Kabupaten Cirebon memiliki wilayah laut yang dapat di eksplorasi seluas sekitar 499 kilometer persegi. Sungguh





potensi laut yang luar biasa. Pemanfaatannya masih belum terlihat. Hanya sedikit untuk wisata pantai dan wisata hutan mangrove.

Dari sisi produksi perikanan tangkap, Kabupaten Cirebon pun jauh tertinggal dibanding dengan Indramayu. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Cirebon, pada 2020, hanya Rp 27,9 juta. Sedangkan Indramayu mencapai Rp 10,5 miliar.

Katakanlah, itu karena garis pantai Indramayu lebih panjang dan jumlah nelayan lebih banyak. Tapi mari kita bandingkan, produksi tujuh TPI yang ada di Kabupaten Cirebon dengan satu TPI di Indramayu. Total produksi perikanan tangkap di tujuh TPI Kabupaten Cirebon, pada 2020, sebanyak 3.847 ton. Sedangkan, TPI Karangsong Indramayu 18.448.383 ton.

Sungguh perbedaan yang sangat mencolok. Satu TPI

di Indramayu mengalahkan gabungan tujuh TPI di Kabupaten Cirebon. Ada apa dengan Kabupaten Cirebon? Bahkan, informasi terakhir, dari tujuh TPI yang ada di Kabupaten Cirebon, kini tinggal 4 yang hidup (beraktivitas).

Salah satu masalah, kenapa TPI hidup segan mati pun dibiarkan, karena konon kalah dengan para tengkulak. Nelayan terjebak hutang biaya berlayar, sehingga terpaksa menjual hasil tangkapan-nya pada tengkulak, bukan melelangnya di TPI.

Tentu saja, menjual ke tengkulak dengan harga yang tidak berpihak pada nelayan. Yang jadi pertanyaan: kenapa negara (pemerintah daerah) kalah dengan tengkulak? Matinya TPI adalah kekalahan negara.

Tak mampu memfasilitasi nelayan dengan alat tangkap dan kapal besar adalah hilangnya kepedulian terhadap jati diri bangsa, sebagai negara maritim. Laut begitu

kaya. Untuk menuju lautan kekayaan itu, Kabupaten Cirebon punya pintu masuk (garis pantai) yang cukup panjang.

Lantas kenapa nelayan masih terbelakang, dan produksi hasil laut Kabupaten Cirebon masih tertinggal? Selain, lupa pada jati diri sebagai negara maritim, dan lupa akan sejarah kejayaan Pelabuhan Muara Jati di Gunung Jati; selama ini kehidupan masyarakat dan pemerintahan juga telah berposisi membelakangi laut.

Kebijakan pembangunan tak lagi menempatkan laut sebagai beranda depan. Sehingga, TPI seolah dibiarkan mati perlahan, nelayan tak mampu berlayar, dan kapasitas alat tangkap seadanya.

Saatnyalah, Kabupaten Cirebon memutar kembali sejarah kejayaan Pelabuhan Muara Jati, menjadi laut sebagai beranda depan. Pemerintah harus menjadikan

prioritas utama pemanfaatan potensi kelautan.

Nelayan harus diberdayakan dengan keahlian dan alat tangkap yang canggih. Luas wilayah laut harus dieksplorasi untuk kemaslahatan, kebaikan, dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Jika tidak, bukan hanya dicap kualat pada sejarah dan identitas negara maritim, tapi juga merendahkan potensi diri: hanya diam menyaksikan nelayan (dan Cirebon sebagai Kabupaten) tetap miskin di tengah laut yang kaya.



Merdeka *Sing* Corona

Indonesia belum merdeka. Satu setengah tahun sudah Indonesia berjuang. Namun, kemenangan itu belum jua di tangan. Sejak Maret 2020, ketika pre-siden mengumumkan perang melawan covid-19, hingga kini Indonesia belum terbebas. Lantas kapan Indonesia bisa bergelar MSC, alias merdeka sing corona? Bisakah?

Hingga pertengahan Agustus, warga Indonesia yang terinfeksi covid-19 per harinya masih di atas 20.000. Bukan angka yang kecil. Sebaran merah-nya pun masih mengancam sebagian besar wilayah Indonesia.

Total sudah 3.854.354 orang yang terkonfirmasi

positif covid-19. Namun, sebagian kalangan meyakini bisa tiga kali lipat dari data Kemenkes tersebut. Banyak orang yang positif tidak melapor atau terdata. Bahkan, adapula yang secara gejala kuat mengindikasikan terinfeksi, namun *ogah* tes swab.

Bersyukur, dari sejumlah



**Mau meriam yang besar,
mau virus yang kecil...
Lawan dengan semangat
bambu runcing.**



Mohamad Luthfi

itu, ada sebanyak 3.351.959 yang dinyatakan sembuh. Mereka me-nyandang pre-dikat LC, alias lulus covid. Tentu saja banyaknya LC, tidak serta merta membuat Indonesia meraih predikat MSC. Perang masih belum selesai. Daerah merah masih menyal.

Dalam perjuangan itu tak sedikit pula yang gugur, tercatat ada 117.588 orang meninggal dengan status positif covid-19. Lagi-lagi banyak yang meyakini ang-kanya lebih dari itu. Namun, ini bukan soal angka. Ini soal nyawa. Satu saja sangat berar-ti. Belum lagi, pengorbanan atau kerugian dari aspek lainnya.

Jika dibandingkan penja-jahan zaman kolonial, maka perang melawan covid-19 ini penderitaan/kerugiannya tidak jauh beda. Bidikan pen-jajah adalah kekayaan alam negeri ini. Namun, dampaknya pada kesehatan/hilangn-

ya nyawa, kebodohan, hingga kemandirian/kemerdekaan bangsa.

Bagaimana dengan seran-gan covid-19? Hampir mirip. Hanya saja, bidikan awal vi-rus tentu kesehatan. Dampak-nya, pada ekonomi yang kian terpuruk, sekolah mandeg, hingga kemandirian bangsa atas kebutuhan obat, alkes, hingga vaksin.

Jika masalah itu kita tero-pong hingga ke individu, maka dampak serangan virus ini semakin terlihat. Orang yang sehat dan kesulitan ekonomi dibatasi ruang ger-aknya. Keberlangsungan hid-up terancam.

Sementara yang terinvestasi harus berhadapan dengan obat, vitamin, oksigen, dan ruang perawatan yang lang-ka. Kalaupun ada, harganya selangit. Sudah ekonomi sulit, sakit, harga pengobatan se-langit. Sungguh, bukan fase mudah.

Jika bangsa ini (Anda),

kini merasakan penderitaan itu, maka bayangkanlah penderitaan pendahulu kita yang dijajah selama 350 tahun. Hanya makan gapek, dipaksa kerja rodi. Sehat, dicambuk agar bekerja. Sakit, terbuang sia-sia.

Setelah itu, ingatlah: apa yang membebaskan mereka dari penjajahan? Senjata canggih, senapan mesin, meriam, bom, pesawat tempur atau kendaraan lapis baja? Tidak. Untuk makan saja sulit, *boro-boro* buat beli alat perang yang canggih. Mirip seperti perang melawan corona, bukan? Bahkan, mungkin sekarang kondisinya lebih baik.

Lantas apa yang membuat mereka menyatakan kemerdekaan? Semangat persatuan. Dengan persatuanlah kotak-kotak perjuangan, melebur menjadi satu kekuatan besar. Satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa: Indonesia.

Pelajaran dari para pendahulu itu sangat berharga, dan

relevan kita terapkan dalam perang kali ini. Jika rakyat dan pemerintah tidak bersatu, sulit corona sirna. Jika masih ada yang memanfaatkan masa-masa sulit ini untuk kepentingan dan memperkaya pribadi, maka jangan harap kita meraih MSC.

Jika penderitaan selama 350 tahun saja bisa dikalahkan, maka kesempatan selama satu setengah tahun ini harusnya bisa cepat diakhiri. Tetaplah semangat Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-76. Dirgahayu Indonesia!



Nyate Bro

Jika ingin mendunia, belajarlh sama sate. Sekilas ini terkesan lebay. Tapi begitulah adanya. Sate kini telah menjadi kuliner mancanegara.

Ketenarannya membuat ia masuk dalam kosa kata Bahasa Inggris, kata 'sate' diserap menjadi *satay*. Dalam *Oxford English Dictionary* dijelaskan bahwa *satay* merujuk pada kuliner sate asli Indonesia.

Namun, benarkah kata 'sate' atau sate merupakan

makanan asli Indonesia? Beberapa sumber mengatakan bukan asli Indonesia. Konon, sate merupakan serapan dari Bahasa Tamil: *catai*. Kata ini berarti daging.

Serapan itu berhubungan erat dengan sejarah sate masuk ke Jawa. Pada Abad ke-15, makanan ini dikenalkan oleh



**Asyiknya
rame-rame Kang...**



para pedagang Arab, Gujarat, dan India, sebagai kebab. Namun, karena terbuat dari *catai* (daging), lidah Nusantara pun menyebutnya dengan sate.

Sate di negara lain dikenal dengan Yakitori (Jepang), Espetadas (Portugal), Satti (Filipina), Suya (Nigeria), Dakkochi (Korea), Brochette (Perancis), Chuanr (Cina), dan Kebab (Timur Tengah).

Uniknya, ia terkenal bukan karena sesuatu yang bombastis dan menghebohkan. Ia mendunia jus-tru karena kesederhanaan dan kemudahan dalam membuatnya. Persis seperti sepakbola, ia menjadi olahraga yang merakyat karena mudah dan tidak perlu peralatan macam-macam. Cukup ada bola (meski dari plastik), gawang dari sandal atau batu, jadilah permainan sepakbola yang mengasyikkan.

Sate juga dibuat tidak perlu bumbu macam-macam, dan tidak perlu keahlian sebagai chef. Cukup diiris, ditu-

suk, lalu dipanggang di atas bara, selesai. Langsung bisa dinikmati. Meski tanpa bumbu sudah lezat dan gurih.

Saking mudahnya... Saat idul adha, siapaun bisa jadi tukang sate. *Ngipit* dimana-mana, mudah, lezat, asyiknya rame-rame. Karena itulah, sate seolah menjadi kata wajib dalam kalimat sapaan: "*Wis nyate durung bro?*"

Di dalam kesederhanaan nyate saat idul qurban, ternyata ada simbol nasionalisme, setidaknya sebagai bentuk pengamalan pancasila. Anda boleh menyebut ini cocoklogi, tapi ini pelajaran yang bisa kita ambil dari kesederhanaan nyate.

Pertama jelas sebagai bentuk pengamalan sila pertama. Berqurban adalah perintah agama. Pemo-tongan hewan qurban juga sebagai simbol bahwa kita bertekad membunuh sifat kebinatangan dalam diri kita. Manusia harus berkiprah sebagai manusia, dengan ke-

beradaban dan keadilan yang selalu ditegakkan.

Sate juga memberikan pelajaran persatuan. Dalam satu tusuk sate terdiri dari beberapa jenis da-ging, gajih, hati, bahkan torpedo (testikel). Berbeda 'suku' tapi tetap satu. Bahkan, potongan daging juga ada yang kecil dan besar, tak jadi soal. Berbeda 'derajat potongan' tetap rukun berdampingan.

Gotong royong, kerjasama, saling membahu saat nyate adalah pelajaran demokrasi yang sangat berharga. Betapa demokrasi jika dijalankan dengan riang gembira berjalan begitu indah. Tak perlu ada gebrak meja, kursi terbang, saling nyinyir, atau bahkan baku hantam.

Riang gembira juga membuat pekerjaan dijalankan dengan ringan, suka rela, dan tidak ada yang merasa didholimi secara sosial akibat pembagian pekerjaan yang tidak merata. Begitupun saat

menikmati sate, keadilan tidak harus dibagi rata, cukup dinikmati bersama, makan semampunya, semua bahagia.

Lengkap sudah pelajaran pengamalan lima sila dari sate idul adha. Untuk itu, mari tetaplah mengaru-ngi hidup dalam kesederhanaan, namun diliputi kelezatan. Juga, mari amalkan pancasila dengan riang gembira, tanpa sindiran, nyinyiran, maupun klaim-klaiman.

Sederhana dan riang gembira, akan membuat hidup lebih berwarna. Jika, kita sudah merasa ruwet, suntuk, dan jenuh, jangan lupa *nyate dulu Bro !!!*



Haji Udin Vs Haji Belanda

Ini cerita unik. Obrolan ndeso, tapi cukup me-ngusik pikiran. Siang itu, sohib saya, sebut saja bernama Udin (bukan nama sebenarnya), menolak di depan namanya dicantumkan huruf H. Ia kukuh agar di dokumen itu hanya tertulis namanya saja.

Saya bilang gak usah, malu saya kalau ada huruf “H” di depan nama. Saya malu kalau nanti masuk neraka, masa haji kok masuk neraka,” jelasnya terlihat serius.

“Ah, paling kamu malu kalau nanti mau masuk ke diskotik. Masa haji kok masuk tempat ajojing,” timpal Wasta.

“Hus.. enak bae, aja maning gelar haji, gelar sarjana saja gak saya pakai. Malu, kalau nanti masuk neraka, masa sarjana masuk neraka,” balas Udin.

“Ya kamu masuk surga dong,” ucap Wasta mencoba mematahkan argumen Udin. “Nah, bener Ta, setuju! Le-





bih enak gitu, gak pake gelar haji, gelar sarjana, tapi masuk surga," sambut Udin sambil terkekeh.

Percakapan singkat dua sohib di atas cukup membuat saya merenung. Buat apa sih gelar? Hanya tanda bahwa kita pernah sekolah? Hanya tanda kita pernah ibadah haji?

Memang aneh juga, kok ibadah bisa jadi gelar. Padahal, jika kita menengok sejarah, gelar haji adalah alat penjajah Belanda untuk mengawasi gerak umat Islam. Untuk menandai orang-orang yang dianggap berbahaya oleh penjajah.

Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, dan H.O.S Tjokroaminoto adalah sedikit nama dari para tokoh pergerakan, yang seusai haji mendirikan organisasi dan mengusung wacana nasionalisme. Tentu saja itu sangat berbahaya bagi penjajah kala itu.

Maka, Belanda pun mengeluarkan *Pilgrims Ordon-*

nantie Staatsblad 1903 Nomer 26, *Staatsblad* 1922 Nomor 698, *Staatsblad* 1927 Nomor 508, dan *Staatsblad* 1931 Nomor 44. Deretan *Oordonnatie* itu untuk pembatasan ibadah haji dan memantau aktivitas jamaah sekembalinya ke Tanah Air.

Selain itu, *Oordonnatie* juga melarang orang asing, terutama dari Arab, berkunjung ke daerah Indonesia karena dianggap melakukan provokasi. Tokoh masyarakat seperti sultan, kaum priyayi, penguasa daerah, dan abdi dalem dilarang pergi haji. Mereka dikhawatirkan akan menjadi poros pergerakan me-lawan penjajah.

Masih satu paket, Pemerintah Kolonial Belanda membuka Karantina Haji di Pulau Onrust, Teluk Jakarta. Karantina ini tentu saja dengan alasan mencegah peneluran penyakit. Aslinya banyak jamaah yang jika dinilai akan menimbulkan masalah

bagi penjajah, maka hidupnya akan diakhiri.

Oordonnatie juga mengharuskan bagi yang sudah berhaji untuk selalu mencantumkan gelar haji di depan namanya. Ini bertujuan agar mudah diawasi. Jadi, singkatnya, haji itu berbahaya bagi penjajah.

Nah, jika dulu sebutan haji dijadikan alat penjajah untuk memata-matai gerak penyangdangnya, kini seolah menjadi gelar. Mirip-mirip gelar ke-sarjana-an. Mudah-mudahan hanya sebatas gelar, bukan mendistorsi ibadah menjadi kebanggaan.

Sebentar lagi musim haji, pemerintah Indonesia sudah memutuskan, karena pertimbangan pandemi, tidak mem-berangkatkan jamaah haji. Pemerintah Arab Saudi pun membatasi secara ketat pelaksanaan haji tahun ini.

Mari mengambil hikmah, yakinlah bahwa itu semua yang terbaik buat kita semua.

Sekaligus memberi kesempatan kepada kita untuk mere-nung, meluruskan niat. Ba-rangkali ada niat yang belum pas. Terutama bahwa berhaji itu ibadah, bukan untuk men-cari gelar.

Namun, jika gelar itu disematkan untuk menjauhi kemaksiatan dan membatasi diri (seperti penjajah Belan-da), ya boleh-boleh saja. Ka-lau pun menganut keyakinan seperti teman Udin di atas juga boleh-boleh saja.

Yang jelas, gelar haji hanya penanda bahwa sese-orang pernah berhaji, dan gelar sar-jana hanyalah tengara bahwa kita pernah sekolah. Gelar ti-dak sepenuhnya mencermink-an diri seseorang. Gunakan semestinya, dan luruskan niat.



Musyawarah Ketupat

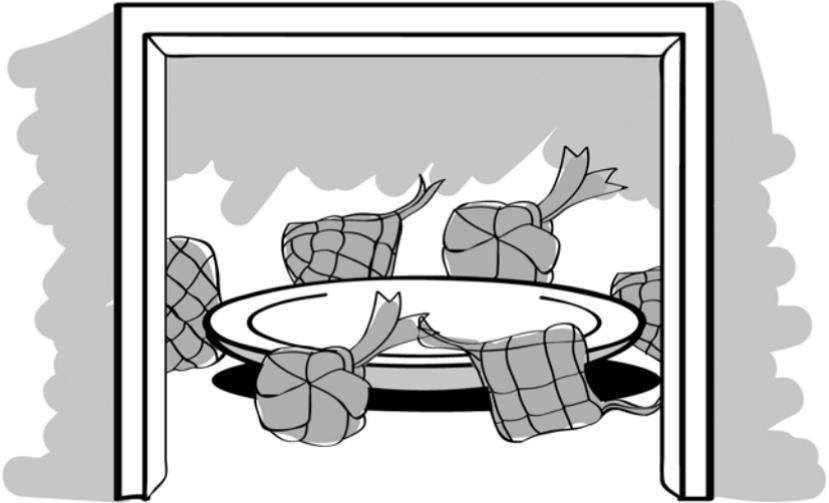
Saat lebaran, biasanya ketupat menjadi makanan yang dikangeni. Wajib ada di meja makan. Namun, benarkah demikian? Bukankah setiap saat orang bisa membuat dan makan ketupat? Lantas apa sebenarnya yang dirindukan?

Dalam momen Idul Fitri, ketupat adalah salah satu medium pertemuan. Keluarga dari berbagai daerah berkumpul, makan ketupat bersama. Pada kesempatan itulah berbagai hal dibicarakan, mulai dari yang sepele hingga ke masalah keluarga yang serius, seperti rencana per-

nikahan hingga penyelesaian warisan.

Suasana obrolan keluarga besar, yang biasanya diawali dengan acara saling memaafkan itu, begitu hangat, positif, dan solutif. Diiringi canda gurau, santai, tanpa harus ngotot, apalagi gebrak meja. A-syik lah pokoknya.

**MAAF,
KETUPAT SEDANG RAPAT**



**Mau maju?
Bermusyawarahlah
seperti ketupat**



Begitulah musyawarah dengan hidangan ketupat lebaran. Selalu dirindukan.

Tahukah Anda bahwa ketupat bukan hanya ada di Indonesia. Ia juga ada di Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam, bahkan Filipina. Di kawasan melayu dikenal dengan nama ketupat. Di Filipina (bahasa Tagalog) dikenal dengan bungnoy.

Bagaimana dengan di Indonesia? Juga punya nama yang berbeda di beberapa daerah. Bali: tipat, Banjar: katupat, Betawi: tupat, Gorontalo: atupato, Jawa/Sunda: kupat, Madura: ketopak, Makassar: katupa', Minangkabau: katupek, dan Sasak: topat.

Sekarang coba Anda bayangkan: ada keluarga di Cirebon memiliki enam anak. Keenamnya sudah menikah, dan merayakan lebaran bersama di Cirebon. Saat pulang shalat id para menantu berbincang: yang satu bilang

bahwa ingin segera makan katupek, yang kedua ingin makan ketopak, berikutnya tak sabar hendak makan kupat, atupato, tipat, dan terakhir ingin makan bungnoy. Silakan telusuri keluarga Cirebon itu memiliki menantu dari mana saja.

Pertanyaannya: apakah di meja makan keluarga Cirebon itu ada enam jenis menu pokok? Tidak, hanya satu ketupat. Berbeda-beda nama, tapi tetap satu ketupat. Dalam meja makan itulah perbedaan nama itu lebur dalam satu wujud.

Selain beda nama ketupat juga memiliki bentuk yang berbeda, bukan hanya berbentuk belah ketupat, tapi juga ada yang segitiga, persegi panjang, bahkan ada yang seperti kuntum bunga.

Perbedaan bentuk itu juga melahirkan nama ketupat yang berbeda, ada ketupat jago, berbentuk segitiga sama kaki, ketupat ini biasanya ada

di Kudus. Ada juga ketupat tumpeng (kerucut), sidalungguh, sari, bata, sidapurna, bebek, geleng, bagea, penda-wa, gatep, dan ketupat sintok. Nah, ketupat sintok (debleng) inilah yang kerap kamu temui saat lebaran, berbentuk belah ketupat sempurna.

Ketupat mempunyai nama bermacam-macam juga bentuk berbeda-beda, namun mereka tetap satu ketupat. Makanan yang disantap penuh de-ngan kekeluargaan, positif, dan solutif. Jika kita tarik dalam konteks keindonesiaan, maka meski kita berbeda-beda suku, warna kulit, dan postur (bentuk) tubuh, namun tetap satu Indonesia. Untuk itulah, mari bangun negara ini dengan semangat musyawarah ketupat.



Jalan Air

Pemuda itu tergegap. Ia terburu menyeka wajahnya. Ia berteriak, namun kendaraan yang baru saja melintas sudah jauh. Upayanya ber-teduh di pinggir jalan sia-sia. Sekujur tubuhnya kini basah. Semburat air hujan di jalan yang tergilas roda mobil, begitu banyak mengenai dirinya.

Drama pemuda berteduh malah kuyup di atas hanyalah penggalan kecil dari cerita derita akibat air hujan. Anda, keluarga Anda, teman, bahkan orang lain mungkin punya kisah yang berbeda. Bahkan bukan hanya genangan, tapi berupa banjir yang menenggelamkan

persawahan, rumah, sekolah, hingga kantor pemerintahan.

Ironisnya pula, beberapa orang, beberapa tempat mengalaminya bukan hanya sekali. Tapi, tiap tahun, setiap musim hujan tiba. Hingga ada istilah 'langganan banjir' dan 'rutin mengungsi'.

Kalau sudah seperti itu: air





hujan yang sejatinya adalah berkah dan rezeki dari langit berubah menjadi derita. Apa yang salah? Bisakah disebut sebagai bencana alam?

Air dari langit yang kembali ke bumi secara alamiah (*sunnatullah*) tentu akan meresap ke tanah atau menuju ke laut. Yang jadi masalah adalah bagaimana kondisi permukaan tanah? Masihkah membuat air meresat dengan senyap? Ataukah damai menuju laut?

Hutan sebagai penampung air sudah menipis. Berubah menjadi industri dan permukiman. Sementara, di permukiman, sejauh mata memandang, bumi telah tertutup aspal dan semen. Sedangkan sungai, banyak yang dangkal dan penuh dengan sampah.

Airpun memilih jalan manusia atau kendaraan untuk dijadikan jalannya. Akses lumpuh, begitu media memberitakan ketika jalan tertutup (tergenangi/terbanjiri) air.

“Halo manusia, aku harus meresap atau berjalan kemana? Kalian merampas jalanku, aku pakai jalanmu saja yah.” Begitu sepertinya air hujan menyapa manusia.

“Aku ingin meresap ke bumi, tapi sudah tertutup rumahmu. Jadi, aku basahi saja atap rumahmu. Sungaiku juga sudah dangkal dan tertutup sampah, permisi aku buat jalan sendiri melewati dan menje-bol tanggul.”

Pesan dari air begitu jelas. Masihkah diam atau setengah hati menjawabnya? Lihatlah di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon 2019-2024. Data menunjukkan bahwa jalan di Kabupaten Cirebon yang disertai jalan air (gorong-gorong) hanya 6% (enam persen).

Angka yang mencengangkan, sekaligus memak-lumi. Maklum kalau selama ini banyak jalan yang langganan banjir. Jika ada yang bertanya:

kok bisa membangun jalan dengan konstruksi seperti itu? Maka jawabnya: sudahlah kita tidak perlu panjang lebar membahas masa lalu. Mari kita tatap masa depan. Bagaimana caranya agar angka itu menjadi 100%.

Itu adalah tantangan bagi kita semua. Tahapan-tahapan pembangunan harus dibuat secara berkualitas. Anggaran dan pelaksanaan bukan hanya sah secara administratif, tapi rakyat harus benar-benar merasakan manfaatnya.

Mari terus pantau, sejauh mana jalan air dibangun? Berapa persen pencapaiannya? Berapa sungai yang sudah dinormalisasi? Apa yang sudah dilakukan di hulu? Adakah pembangunan waduk atau bendungan? Penghijauannya seperti apa?

Sekali lagi, menyelesaikan banjir bukan hanya di atas kertas. Perlu partisipasi semua pihak. Mulailah dari hal yang sederhana. Sudah-

kah Anda membuat resapan-resapan di lingkungan sekitar Anda? Jika belum, lakukanlah dari sekarang. Meski sederhana, ini bukan hal kecil.

Jangan remehkan hal kecil. Ingatlah, air begitu lembut tapi bisa mengikis kerasnya batu, bisa menjebol keangkuhan bangunan, dan bisa menghanyutkan keserakahan.

Siapa pun Anda, perlakukanlah air dengan baik. Kalau tidak, dengan sopan ia akan bicara: "Maaf saya mau lewat dulu, membasahi jalan, rumah, kantor, dan baju kesukaan (kebesaran) Anda. Agar pikiran dan hati Anda dingin. Tapi jika Kalian saling menyalahkan, maka akan aku tenggelamkan."



Sedang-sedang Saja

Sore itu di sebuah kedai makan. Kami memilih meja di ujung ruangan. Suasana tidak begitu ramai. Perbincangan di meja sebelah pun cu-kup jelas terdengar.

Kapan ya corona mari (berhenti)?" ujar sosok pria berperawakan kurus. "Marie ya lamon sira ora mikiri (berhentinya kalau kamu gak memikirkannya)," jawab pria berkumis di hadapannya singkat, disusul suara kerupuk yang ia kunyah.

"Yee pribe beli mikiri wong

ana jeh (gimana tidak memikirkan, orang nyatanya ada)," ujar si Kurus. "Biasa aja kali, *anggep bae kaya virus sejene. Apama-ning akeh virus sejene sing luih ganas* (anggap saja se-perti virus lainnya. Apalagi banyak virus lainnya yang lebih mematkan)," timpal si Kumis.

**Mau yang mana?
Yang sedang-sedang saja...
bagaimana?**





Begitulah obrolan kedai makan. Dialog serupa, saya yakin, juga terjadi di tempat lain, di kedai-kedai kopi, warung sayur, pasar, sawah, kantor, hingga di ruang-ruang keluarga, bahkan mungkin di kamar pengantin.

Apa yang dikatakan si Kumis sekilas tampak sepele, namun cukup menarik. Perang sesungguhnya terhadap covid-19 kini sudah menjadi perang pikiran. Karena sejatinya perang terhadap virus, sebagaimana virus dan penyakit lainnya, tidak ada istilah menang atau kalah. Tapi soal bisa sembuh atau tidak.

Bahkan, jika standarnya atau ujungnya adalah kematian, maka yang ada hanyalah sementara sembuh atau sementara sehat. Tidak ada kemenangan abadi dalam menghadapi masalah fisik. Kematian pasti akan menjelang.

Untuk itulah, kata si Kumis, ini soal pikiran. Tidak

perlu menyepelekan, juga tidak boleh berlebihan. Biasa-biasa saja. Hadapilah covid-9 sebagaimana menghadapi virus lain, seperti influenza, batuk, pilek, polio, gondongan, campak, herpes, ebola, aids, hepatitis, hingga flu burung.

Sekali lagi, ini soal bagaimana pikiran kita menghadapinya. Hadapilah covid-19 ini dengan ringan saja. Jalankan protokol kesehatan. Berikutnya jalankan protokol keagamaan: berdoa dan tawakal. Selanjutnya beaktivitaslah seperti biasa.

Jika saatnya vaksinasi, ya ikuti saja jika memang Anda yakin. Jika tidak, ya itu hak Anda. Anggap saja seperti vaksinasi untuk virus lainnya, sebut saja vaksinasi polio atau campak. Ada yang bersedia, ada yang tidak kan? Jadi, biasa saja gak perlu debat, apalagi berantem sesama teman. Meski demikian, ada baiknya ikuti anjuran pemerintah.

Jadi, kalau ada yang bertanya kapan covid-19 berhenti? Ada baiknya mengikuti tips si Kumis: berhentilah berpikir berlebihan, berhenti bertanya. Pada saat Anda menyikapi sesuai porsinya, maka di saat itulah corona berhenti menghantui Anda.

Namun, jangan meremehkan, takabur, dan sombong. Jalani saja protokol kehidupan yang terbaik. Toh, protokol kesehatan dan ketawakalan melahirkan badan dan jiwa yang sehat, bukan? Jadi jalan-kanlah dengan senang hati, karena gaya hidup sehat bukan hanya menangkal covid-19, tapi juga virus lainnya.

Jika dipikirkan berlebihan, hingga menghantui diri, justru dapat berdampak sebaliknya, bisa sakit secara fisik dan kejiwaan. Pikiran yang tertekan atau stres mengakibatkan asam lambung naik, dan akan mengganggu pencernaan dan kesehatan Anda.

Apapun virus atau penyakitnya, tidak hanya covid-19, bisa berdampak buruk dan menyebabkan kematian. Sedangkan kematian adalah hal yang harus kita siapkan, bukan ditakuti. Nah, masalahnya justru ada di pikiran kita. Sejauh mana kita dapat menata pikiran dalam menyikapi itu semua.

Sekali lagi, bersikaplah tidak berlebihan, juga tidak meremehkan. Sedang-sedang saja. Beraktivitaslah seperti biasa. Jalani saja protokol yang ada. Semuanya akan ringan dan riang.



Kera Juga Bekerja

Pagi ini tanah masih basah. Sepertinya hujan semalam cukup lebat. Udara terasa begitu sejuk. Secangkir kopi hitam sudah setia menunggu di meja serambi belakang. Baru saja saya menyeruputnya perlahan, sebuah pesan masuk ke ponsel.

Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja, kera juga bekerja." -- Buya Hamka.

"Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang

mendahulukan istirahat sebelum lelah." --Buya Hamka.

Ternyata, seorang teman meneruskan pesan (*forward message*) dua kutipan kata mutiara karya Buya Hamka tersebut. Membaca itu, beberapa hal terlintas dalam pikiran. Pertama, tentu saja tentang sosok luar biasa pemilik nama



**Sudah terlanjur hidup
jadi manusia,
jangan malas Bro!**



lengkap Prof. Dr. Haji Abdul Malik bin Dr. Syaikh Haji Abdul Karim Amrullah.

Ia seorang sastrawan, aktivis, filsuf, sekaligus ulama. Karya putra kelahiran Agam, Sumatera Barat, 17 Februari 1908 ini begitu abadi. Petuah-pe-tuahannya tak lekang dimakan zaman. Malah terasa semakin tajam. Bukunya, yang berjudul *Pribadi Hebat*, sangat menginspirasi.

Yang kedua, saya ingat beberapa waktu lalu kala reses kunjungan ke desa. Seekor monyet (kera) sedang bekerja. Ia sedang memerankan Saridin dalam pentas topeng monyet. Cukup menghibur. Meski mungkin ia hanya 'sekadar bekerja' --seperti kata Buya Hamka.

Monyet hanya melakukan gerakan sesuai dengan apa yang dilatih sang tuan. Begitu saja terus setiap pentas: mengulangi pekerjaannya. Tak ada yang lain, sekadar bekerja. Mungkin itu yang dimak-

sud Buya Hamka.

Tentu ini sindiran tajam bagi kita sebagai manusia, yang memiliki rasa, akal, dan budi. Kalau kita bekerja se-kadar bekerja, maka kita tak ubahnya se-perti kera dalam pentas topeng monyet.

Sebagai anggota DPRD, misalnya, jika berkerja hanya datang, tanda tangan, duduk, *yes*, dan palu diketuk, bisa jadi kita seperti kera yang diungkapkan Buya Hamka. Pun dengan profesi lain, jika tidak bisa memberikan nilai tambah, maka tak ubahnya seperti robot hidup.

Apalagi, jika bekerja hanya untuk catatan keha-diran (presensi), habis itu menghilang tanpa jejak. Makan gaji buta. Bisa jadi, yang seperti ini, lebih buruk dari cara bekerja kera. Ya, karena kera tak pernah korupsi waktu.

Untuk itu Buya Hamka mengajarkan kita agar menjadi pribadi yang rajin, tidak malas. Pribadi yang meng-

hasilakan karya adiluhung dari hasil olah pikir. Manusia diberikan pikiran yang cemerlang adalah anugerah tak ternilai. Merupakan “pengkerdilan terkejut, jika pikiran menjadi budak tubuh yang malas.”

Perbudakan seperti itu jelas menurunkan derajat kemanusiaan pelakunya. Kesempurnaan sebagai manusia dikebiri menjadi hanya sebatas derajat kera. Sungguh memprihatinkan.

Bukan hanya itu, bahkan bisa mengesankan. Jika pikiran yang sudah terlanjur jadi budak kemalasan itu diperintahkan untuk melakukan kecurangan, dan hal-hal yang melanggar hukum. Kemungkinan itu sangat besar terjadi, karena demi menutupi kemalasan biasanya orang cenderung berbuat curang atau melanggar hukum.

Untuk itu, kita harus menjadi pribadi yang rajin, bersemangat, dan selalu mengolah

pikiran agar menghasilkan terobosan, inovasi, dan pembaharuan. “Jangan mendahulukan istirahat sebelum lelah,” kata Buya Hamka.

Meski demikian, itu semua adalah pilihan. Silakan Anda tentukan mau bekerja seperti kera, atau menghidupkan pikiran dengan menghasilkan dan mewariskan karya.

Kalau bagi saya, kita sudah terlanjur hidup sebagai manusia, maka tak ada pilihan lain, selain mengikuti tauladan Buya Hamka: tidak menjadi budak kemalasan.



Laron Akhir Tahun

Maghrib menjelang. Hujan baru saja reda. Ini entah yang ke berapa, langit menumpahkan air di akhir November.

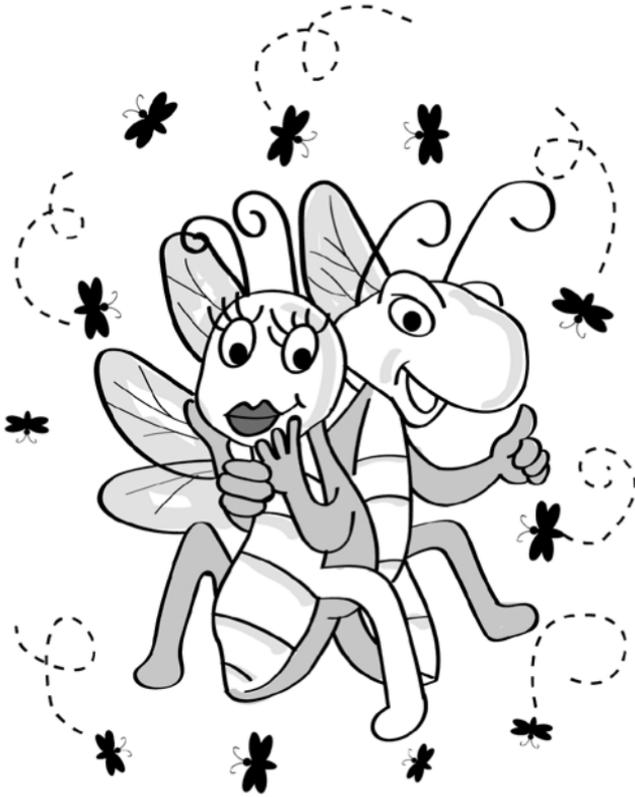
Suara adzan menggema. Kami pun bergegas menuju mushola. Masih ada rintik yang lembut menyapa kulit.

U sai sholat, hari semakin gelap. Lampu-lampu menyala terang. Di teras rumah, laron-laron beterbangan, berebut mendekati sumber cahaya. Sebagian sudah terkapar jatuh di bawah lampu. Semut berdatangan menarik bangkai mereka.

Tahukah sobat, laron yang

mati terkapar itu adalah laron *jomblo*. Ia tewas secara tragis karena tidak menemukan pasangan. Begitulah siklus hidup laron.

Sejatinya laron adalah rayap reproduktif. Alias rayap yang dalam proses beranak-pinak. Ia keluar sarang ketika tanah lembab diguyur hujan. Beterba-



**Ga mau terus-terusan
ngejomblo? Harus berani
berkompetisi dong...**



ngan di malam hari mendekati sumber cahaya.

Dalam waktu semalam itulah ribuan laron harus menemukan pasangan demi kelanjutan hidup kerajaan rayap. Konon satu indukan rayap dalam sehari bisa menghasilkan 30 ribu butir telur.

Nah, selain laron (rayap bersayap) ada juga koloni rayap pekerja dan prajurit, mereka tugasnya bekerja mencari makanan dan menjaga sarang. Sedangkan koloni laron bertugas melahirkan generasi baru.

Saat musim hujan adalah waktunya laron kawin atau mati karena jomblo. Laron hanya punya waktu semalam untuk menemukan jodoh. Dari ribuan itu hanya 10 persen yang menemukan pasangan.

Mereka yang berjodoh akan turun ke tanah bersama; melepaskan sayap; kemudian mencari atau membuat sarang baru di tanah. Berbulan madu dan membuat koloni baru.

Sementara yang tak me-

nemukan pasangan mati mengenaskan. Begitulah kisah perjodohan laron dalam semalam. Sangat kompetitif. Hanya mereka yang mampu berkompetisilah yang dapat melangsungkan hidup.

Begitupun dengan Anda, dari jutaan sel sperma, Anda-lah yang memenangkan kompetisi membuahi sel telur. Sejak di dalam rahim, kita sudah berkompetisi.

Bagaimana dengan di dunia ini? Sama, kita diperintahkan juga untuk berkompetisi. Namun, bukan berlomba menumpuk harta dan kekayaan. Kita diperintahkan untuk berkompetisi membawa bekal bagi kehidupan berikutnya.

Caranya? Berlombalah dalam kebaikan dan perangilah kemungkarannya. Uniknyanya, kompetisi model ini tidak menuntut kita untuk meniadakan atau membunuh orang lain. Justru sebaliknya, mengajak orang lain dalam kebaikan

adalah bagian dari kebaikan.

Sedangkan membunuh justru dilarang, dan harus diperangi, karena itu bagian dari kemungkaran. Dengan begitu, di dunia ini kita sebenarnya diperintahkan untuk berkompetisi mengajak sebanyak-banyaknya manusia agar terus dalam koridor kebaikan.

Kompetisi itu bukan meniadakan yang lain, tapi membuat, memperbanyak, dan memperbesar koalisi kebaikan. Koalisi kebaikan juga mengajarkan agar kita terus mengalir menjadi lebih baik dalam koridor waktu.

Hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan esok harus lebih baik dari hari ini. Jika, tidak maka kita masuk dalam golongan orang yang merugi. Begitulah resolusi kita lahir ke bumi.

Sayangnya, manusia seringkali terjebak dalam lupa, alpa, bahkan khilaf. Untuk itu perlu setiap saat kita memperbaharui resolusi, tekad, dan

janji kita untuk senantiasa berbuat dalam kebaikan.

Untuk itu, merupakan sebuah kebaikan jika kita senantiasa terus memperbaharui resolusi. Bisa dilakukan setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, atau setiap tahun. Jangan mengagap remeh, apalagi mencemooh orang yang beresolusi, meski dilakukan setiap tahun.

Jadi, tidak salah, bahkan baik, jika di akhir 2020 ini kita membuat resolusi untuk 2021. Buatlah dengan niat ibadah, dan mencapai kesempurnaan hidup.

Selamat beresolusi! Selamat tahun baru!



Pahlawan Lampu Kuning

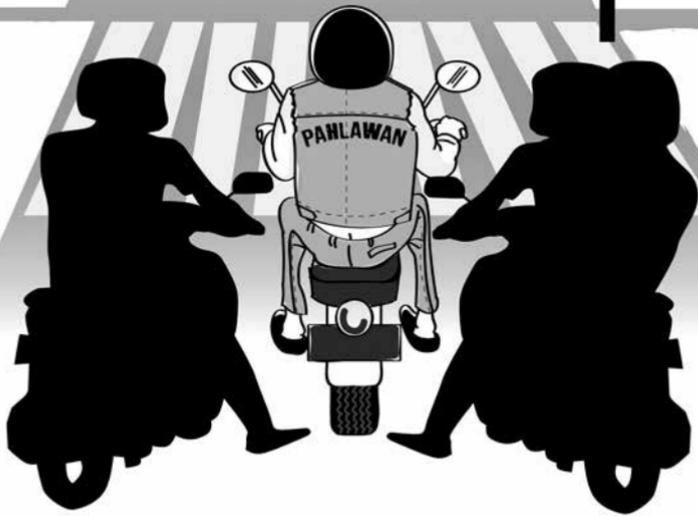
Di sebuah perempatan jalan, lampu kuning menyala. Kendaraan di sebelah kanan kami berhenti. Tiba-tiba klakson menyalak te-rus-menerus, hingga lampu berwarna merah.

Saya menengok ke kanan. Saya menduga, suara klakson itu dari kendaraan di belakangnya. Kebetulan saya duduk di tengah dan posisi mobil agak ke belakang, karena di depan kami ada motor.

Terlihat jelas sang sopir sedang berbincang dengan

orang di sebelahnya, tangannya menunjuk-nunjuk lampu lalu lintas. Saya simpulkan sepertinya dia kesal, terhalangi dan tak bisa menerobos lampu kuning.

Sebuah kesal yang tidak pada tempatnya. Tidak bisa melanggar hukum kok kesal. Bagi saya pengemudi di de-



**Mau jadi pahlawan?
Patuhi rambu lalu lintas**



pannya yang taat dan berhenti itu adalah orang merdeka.

Loh kok merdeka? Bukannya kalau merdeka dia bebas menerobos? Berhenti dan menaati aturan itulah kemerdekaan.

Bayangkan jika manusia menganggap kebebasan semaunya sendiri sebagai kemerdekaan, maka muka bumi ini akan dipenuhi dengan kekacauan. Saling memangsa, membunuh, dan tidak ada ketenangan hidup disitu.

Orang selalu was-was, curiga, dan menggagap musuh orang lain. Pada kondisi itu apakah disebut merdeka? Tentu tidak. Merdeka adalah terjaminnya keamanan dan saling menghormati antara sesama.

Untuk itulah dibuat aturan sebagai perwujudan kemerdekaan, agar orang saling menghormati. Sekaligus, menjamin dan menjaga kemerdekaan setiap orang. Dengan begitu, orang yang

taat aturan adalah orang yang merdeka.

Ia merdeka untuk menghormati orang lain, dan menjalankan kesepakatan bernegara. Orang yang melanggar aturan adalah orang yang menindas dirinya sendiri, tidak merdeka. Untuk itulah pelanggaran aturan bisa kena denda dan hukuman, karena bisa menyebabkan orang lain celaka.

Nah, pengemudi merdekaan taat aturan di atas, dalam sudut pandang lain, sebenarnya juga seorang pahlawan. Dia lah salah satu pahlawan di era kemerdekaan. Pertama karena dia menghormati kemerdekaan; kedua, menjalankan (memperjuangkan) kebenaran; ketiga menghindarkan diri dan orang lain dari celaka.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam

membela kebenaran. Jadi inti dari kepahlawanan adalah 'membela (menjalankan) kebenaran'.

Nah, setiap memasuki November, kita selalu diingatkan tentang hari pahlawan dan kepahlawanan. Di ruang-ruang pembelajaran selalu diceritakan tentang perjuangan Bung Tomo, Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, Imam Bonjol, hingga Cuk Nyak Dien.

Tentu saja hal itu baik dan bagus. Namun, sering-kali eksplorasi figur pahlawan yang berani dan berperilaku jagoan lah yang diterima anak-anak dan pembelajar. Hal itulah yang lebih dominan menancap dibenak dan alam bawah sadar, ketimbang aspek menjalankan atau membela kebenaran.

Apalagi, jika cerita itu didukung dengan visualisasi yang heroik, baik berupa gambar maupun video. Lengkap sudah, persepsi bahwa

pahlawan adalah jagoan (meski tanpa kebenaran).

Untuk itu marilah kita sama-sama perdalam nilai kebenaran dalam keahlawanan, terutama dalam memberikan pembelajaran kepada generasi penerus. Jagoan saja tidak cukup, tapi harus dilandaskan pada kebenaran.

Sehingga ke depan tidak ada lagi ungkapan: "Wih... hebat, jagoan...lampu merah diterabas!" Namun, diganti dengan ungkapan: "Malu ah me-nerabas lampu merah, wong lampu kuning saja sudah disuruh bersiap berhenti."

Selamat menjadi orang merdeka. Selamat menjadi pahlawan. Mulailah dari lampu kuning.

Selamat hari pahlawan! Merdeka!

CIREBON KATON • November 2020



Bagai Kepompong

Pagi itu, di taman belakang rumah, ada pemandangan menarik. Seekor burung pipit, yang sigap, tiba-tiba balik kanan. Ia tak jadi menyantap ulat di ranting pohon. Penasaran, saya pun mendekati ulat itu.

Ternyata, makhluk yang saya kira ulat itu sudah menjadi kepompong. Kulitnya yang keras tentu saja menyulitkan burung untuk memakannya. Padahal, kandungan proteinnya sangat tinggi, melebihi jangkrik, ikan, daging sapi, dan kacang-kacangan.

Saya teringat dengan resep rahasia para kicau mania agar burungnya gacor. Mereka membuat *extra food* (makanan tambahan) burung dari kepompong. Kulitnya disobek dengan pisau, lalu disajikan langsung isinya. Ada juga yang isinya dijadikan tepung, lalu dicampurkan dengan pakan.



**Mau hati dan
pikiran sehat?
Sesekalilah menjadi
'kepompong'**



Selain itu, kepompong adalah tahapan serangga akan naik kelas. Dari berdiam diri, menuju terbang bebas di udara. Berdiam diri itulah kini juga dianggap menjadi laku mujarab bagi manusia.

Di tengah pandemi Covid-19, manusia diminta berdiam diri di rumah, bahkan mengisolasi diri. Bisa jadi inilah salah satu fase kepompong dalam peradaban manusia di bumi.

Manusia diminta merenungkan atas apa yang diperbuatnya di muka bumi. Manusia diminta membersihkan bumi dari segala polusi. Bumi se-pertinya sedang menginginkan agar makhluk yang menghuninya menghirup udara segar.

Burung-burung liar, terutama di perkotaan, diberi kesempatan untuk menikmati udara bersih. Kicau mereka, suara jangkrik, tokek, bahkan kodok terdengar lebih nyaring. Tak lagi kalah bersaing

dengan mesin yang bising. Senandung alam sedang memainkan pentasnya.

Bagaimana dengan manusia sebagai pribadi? Berada dalam kepompong, idealnya manusia melakukan proses transformasi diri. Bersiap naik kelas. Terbang menyambut dunia yang sudah kembali segar dan cantik. Dunia baru pun diisi manusia-manusia baru, dengan kebiasaan baru.

Manusia, di masa pandemi, sejatinya dipaksa untuk senantiasa membersihkan diri, baik secara fisik, pikiran, jiwa maupun hati. Protokol kesehatan mengharuskan setiap saat manusia membersihkan fisiknya.

Berdiam diri sebenarnya memaksa manusia untuk introspeksi diri. Membersihkan pikiran dari anasir negatif. Kembali menemukan hakikat diri, baik sebagai pribadi, kepala keluarga, bagian dari keluarga, hingga sebagai pejabat negara.

Mengisolasi diri sebenarnya memberikan ruang lebih banyak untuk membersihkan hati dan jiwa. Lebih mendekatkan diri kepada yang Maha Pencipta. *Taqarrub ilallah*. Membersihkan hati dari kesombongan, iri, dengki, dan ketamakan.

Manusia disadarkan bahwa kekuasaan itu bukan lah kebesaran dan kekuatan. Tuhan membukakan mata bahwa virus yang super kecil saja mampu mematikan manusia, dan membuat ekonomi dunia lumpuh.

Meski begitu, banyak juga yang tidak menganggapnya sebagai sebuah 'kepompong'. Masih banyak manusia yang terus menghiasi diri dengan kesombongan, keangkuhan, dan ketamakan. Bahkan semakin menggila, sebut saja misalnya, bantuan bencana malah dikorupsi.

Akhirnya kembali lagi pada pribadi masing-masing. Meski Covid-19 memaksa

manusia untuk mengkarantina diri, namun tidak semua mengikuti irama alam untuk bertransformasi diri.

Sebaliknya, jika 'kepompong' ini kita tangkap secara substansial, maka transformasi diri tidak harus menunggu atau dipaksa oleh virus corona. Setiap saat, kita bisa mentransformasikan diri, menjadi pribadi yang senantiasa lebih baik dari sebelumnya.

Membersihkan badan, pikiran, hati, dan jiwa harus senantiasa kita lakukan. Bila perlu, lebih cepat dari siklus kepompong menjadi kupu-kupu



Masker

Enam bulan sudah masker menjadi 'pakaian wajib' dalam berinteraksi sosial. Entah sampai kapan. Vaksinasi yang dianggap sebagai game changer (pengubah permainan) masih belum bisa dipastikan kapan bisa dilaksanakan.

Selama enam bulan, tentu saja banyak masyarakat yang berbeda dalam menyikapi sifat 'wajib' masker. Ada yang mengacuhkan, *ogah* memakai masker. Ada yang memakai ketika menghadapi pemeriksaan saja, atau kepergok petugas saat pemeriksaan, sehingga terpaksa memakai.

Ada juga yang sekadar formalitas memakai, asal nempel dan mengait di daun telinga, posisinya cuma di bawah dagu, tak menutupi hidung dan mulut. Tak sedikit juga yang disiplin, selalu memakai masker ketika kontak sosial.

Sekitar tiga bulan setelah himbauan bermasker, seorang



**Nikmati setiap masalah
dengan hati yang cantik**



tenaga kesehatan (nakes) bercerita bahwa orang yang mengeluh sakit berkaitan dengan pernafasan berkurang. Keluhan seperti batuk dan pilek hampir tidak ada. Analisisnya, karena pemakaian masker dan mengurangi mobilitas.

Namun, penyakit berkaitan dengan asam lambung meningkat. Ini disinyalir karena pasien stres menghadapi kenyataan pembatasan kegiatan, dan penyesuaian dengan kebiasaan baru. Terlebih, sumber ekonomi dan penghidupannya semakin sempit.

Kondisi itu wajar, maklum semuanya juga kaget dan tidak siap menghadapi pandemi yang tidak terpikir sebelumnya. Justru, yang patut disyukuri dari cerita nakes di atas adalah soal manfaat langsung bermasker.

Bermasker yang awalnya diniatkan untuk mencegah tertular covid-19, ternyata juga

memberikan manfaat menghindari penyakit lainnya. Masker mencegah sesuatu penyakit masuk ke dalam tubuh, juga mencegah penyakit yang ada dalam tubuh menular ke tubuh orang lain.

Dengan fungsi yang seperti itu, masker bisa memberikan pelajaran yang lebih mendalam bagi manusia. Bahwa seharusnya memang setiap saat manusia membenengi diri dari hal negatif yang berasal dari luar. Juga sebaliknya, mencegah sesuatu yang negatif keluar dari diri kita, agar tidak berdampak buruk bagi orang lain.

Manusia harus melindungi diri pengaruh pikiran negatif orang lain. Juga mengelola diri agar tidak berpikiran negatif, dan meracuni pikiran orang lain.

Selain badan dan pikiran, hati manusia harus terbebas dari rangsangan negatif dari luar. Tidak berprasangka negatif, iri, dengki, dan hasad.

Hati harus terbebas dari kesombongan, tampil jujur, dan berpegang tegus pada kebenaran. Sehingga, tidak memancing penyakit munculnya hati pada orang lain.

Pandemi ini bukan hanya mengingatkan kita untuk hidup bersih secara fisik, tapi juga bersih secara pikiran dan hati. Jika tidak maka akan muncul pe-nyakit lainnya, seperti stres yang diceritakan nakes di atas.

Bahkan, bukan hanya sekadar stres. Covid-19 juga mengingatkan betapa bahayanya pandemi berupa pikiran negatif dan hati yang kotor. Apa yang terjadi jika semakin banyak orang yang berikiran negatif dan berhati keras? Membentuk kluster-kluster dan menyebar begitu cepat seperti Covid-19?

Jangan-jangan, justru sebaliknya, penyakit pikiran dan hati kotor telah dan lebih merebak ketimbang Covid-19. Bisa jadi begitu. Silakan re-

nungkan dan introspeksi diri.

Untuk itu mari menyikapi Covid-19 ini dengan pikiran positif dan hati yang bersih. Sehingga ia tidak menimbulkan penyakit komplikasi yang lebih dahsyat. Hadapilah dengan hati dan pikiran yang ringan, meski tetap serius dan sungguh-sungguh.

Lihatlah para produsen dan pengrajin masker. Mereka menghadapi pandemi dengan positif, dianggap sebagai peluang usaha. Mereka berkreasi menghasilkan berbagai macam bentuk dan model masker. “Meski pakai masker, tetap tampil cantik dong...,” ujar mereka.



Merdeka

Di sela blusukan, sore itu, seorang penjual bendera merah putih lewat. Saya membelinya dua helai. Tampak, wajah Pak Tua itu berbinar. Mungkin karena ada pembeli, jadi dia senang. “Bagaimana Pak jualannya, rame?” tanyaku spontan.

Nah itu Pak, ini penglaris. Dari pagi, baru Bapak yang beli. Merah putih sudah merdeka berkibar, tapi kita belum merdeka dari corona Pak, jualan sepi.” Jelasnya.

Selain bendera merah putih, tiap Agustus, kita memang kerap melihat atau mendengar kata ‘merdeka’.

Tiap Agustus pula, orang selalu bertanya: sudahkah kita merdeka? Berbagai analisis dan perspektif pun bermunculan. Begitu seterusnya setiap tahun.

Merdeka dari sisi bahasa berarti bebas; tidak terkena atau lepas dari tuntutan; tidak terikat, tidak bergantung kepada

Orang merdeka itu orang yang taat aturan





orang atau pihak tertentu; dan leluasa.

Nah, dari definisi itu, bagaimana dengan kemerdekaan berbangsa atau bernegara saat ini? Juga beragam, banyak pendapat. Tapi, biasanya mengerucut pada dua pendapat besar.

Pertama, bilang sudah merdeka. Secara *de jure* begitu. Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah mengakuinya. Namun, pendapat kedua mengatakan secara *de facto* belum merdeka, masih dijajah oleh kapitalisme global.

Bak jamur di musim hujan, biasanya perdebatan itu ramai di Agustus, lalu hilang begitu saja. Jadi, bukan hanya lomba panjat pinang dan balap karung, diskursus pun ternyata mengenal musim.

Namun demikian, ada perdebatan soal 'merdeka' yang tak kenal musim. Dari zaman tabi'in hingga sekarang masih terus berlangsung. Berbuku-buku sudah diterbitkan

dari hasil kajian dan diskusi soal itu.

Pertanyaan dasarnya sama: Manusia itu hakikatnya merdeka dan bebas berkehendak, atau seperti wayang, sudah ditentukan lakonnya oleh sang dalang (Tuhan)?

Ada tiga kubu yang lahir dari pertanyaan itu. Pertama, qadariyah, yang meyakini bahwa manusia bebas berkehendak. Kedua, jabariyah, yang meyakini bahwa alur kehidupan manusia adalah ketentuan Tuhan. Ketiga, asy'ariyah, ini aliran penengah, yang mengatakan bahwa kehendak manusia dan Tuhan memiliki porsi masing-masing.

Biarlah itu menjadi kajian. Terlepas dari itu semua, saya lebih tertarik membahas pernyataan penjual bendera di atas. Ucapannya sederhana: "kita belum merdeka dari corona," tapi menyiratkan banyak hal.

Corona telah membata-

si manusia yang mengaku merdeka. Bahkan, hal-hal yang diperintahkan agama dan negara saat sebelum pandemi, kini malah dilarang atau dibatasi. Ini menyadarkan anggapan selama ini bahwa “kalau mau bebas silakan di hutan saja.” Nyatanya setelah sampai di hutan pun, ia tak bisa leluasa keluyuran. Banyak binatang buas yang setiap saat menyeragnya.

Dengan Covid-19, tak perlu ke hutan untuk membuktikan betapa lemahnya manusia yang me-ngaku merdeka itu. Melawan corona bahkan lebih merepotkan, karena wujudnya kasat mata. Keterbatasan akibat corona pun berdampak sistemik. Karena gerak kita terbatas, dampaknya bisa membatasi kegiatan ekonomi orang lain.

Jadi, kemerdekaan itu dibatasi oleh daya dan kemampuan yang manusia miliki itu sendiri. Yang kedua, kemerdekaan seseorang itu di-

batasi oleh manusia lain. Dan terakhir, kemerdekaan manusia itu dibatasi oleh ekosistem dan makhluk lainnya.

Karena ketiga hal itulah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dibuat aturan. Tujuannya tentu saja agar kebebasan manusia tidak saling mengganggu kebebasan manusia lain, makhluk lain, dan ekosistem.

Untuk itulah kemerdekaan yang sesungguhnya adalah mentaati aturan, norma, dan hukum yang ada, baik hukum alam, adat, sosial, negara, maupun agama. Masih mau merdeka, Sob? Taati saja aturan.

CIREBON KATON • Agustus 2020



Akun Palsu

Kang bener nih minta dikirim pulsa?" Begitu bunyi sebuah pesan yang masuk ke aplikasi chatting di ponsel. Tadinya mau saya jawab dengan bercanda: "Iya, yang banyak yah." Namun, buru-buru saya hapus.

Terbersit: sepertinya ada yang tidak beres. Setelah dikonfirmasi, ternyata benar apa yang saya pikirkan. Jejaring pertemanan saya di facebook kena serangan akun palsu. Akun itu mengatasnamakan saya. Foto profil yang digunakan persis seperti akun facebook saya.

Beruntung beberapa teman segera memberi kabar. Sehingga, beberapa upaya saya lakukan. Tentu saja agar tidak ada korban, terkena tipuan murahan.

Kasus serupa, sebenarnya sering saya dengar. Di dunia maya orang dengan mudah bisa menjadi apa dan siapa



**Jadilah diri
sebagai akun asli**



saja. Seorang laki-laki bisa menjadi perempuan. Begitu-pun sebaliknya. Tinggal buat nama dan pasang foto sesuai gender.

Satu orang bisa memiliki puluhan bahkan ratusan akun. Tentu saja tujuannya macam-macam. Ada yang baik, untuk mempromosikan produk, ada juga yang menekuninya sebagai alat tipuan.

Dengan multi-akun seseorang bisa memerankan banyak karakter. Dalam hitungan detik orang bisa mengubah personifikasi sesuai akun yang sedang ia hidupkan. Bahkan memungkinkan dalam waktu bersamaan menjalankan beberapa akun. Tentu dengan multi-perambah, atau multi-perangkat.

Jika di dunia maya begitu mudah akun palsu tercipta, bagaimana dengan dunia nyata? Dalam seni bermain peran, seperti teater, drama, atau film, tentu saja itu terjadi.

Namun, meski itu nyata, tetap saja dalam dunia kepura-puraan. Akun palsu juga dalam format yang lain.

Akun-akun palsu itu dengar sadar dibuat. Tentu dengan motif dan tujuan yang jelas, meski ada yang bertujuan buruk. Namun, tetap dengan kesadaran dan kesengajaan.

Tahukah Anda ada loh akun palsu yang terbuat dengan tidak sadar. Itu terjadi, bahkan jauh dari dunia virtual ada. Ini terjadi benar-benar di dunia nyata. Tidak percaya?

Sekarang cobalah cek pada diri Anda. Ya, diri Anda, pribadi Anda. Adakah akun palsu? Kalau Anda belum menemukan, cobalah ingat hakikat Anda ada di dunia ini untuk apa?

Jika (maaf) Anda sebagai manusia, bagaimana hari-hari Anda lalui selama ini? Pribadi seperti apakah diri Anda? Jika pemarah, kasar, semaunya sendiri. Maka bisa jadi, Anda

bukan lagi jadi manusia. Mungkin (maaf) sudah menjadi binatang. Sudah hilang hakikat kemanusiaan Anda, yang ada akun palsu kebina-tangan.

Coba cek lagi, apakah kejahatan adalah hari-hari Anda? Jika mencuri, meram-pas, menipu, atau membunuh adalah kebiasaan Anda, maka sesungguhnya ada akun palsu pada diri Anda.

Jika Anda mendapati banyak maksiat yang Anda kerjakan sehari-hari dengan meng-unjing, ghibah, iri, dengki, hingga lalai ibadah, maka bisa jadi ada akun palsu. Akun itu (maaf) berupa syetan yang sedang mendominasi Anda.

Sahabat, mari kita sama-sama men-scan keberadaan akun palsu dalam diri kita. Apalagi akun palsu itu terbentuk bukan karena sebuah kesengajaan, tapi karena ulah tipu daya syetan.

Jika diri Anda tak mampu men-scan diri, maka minta-

lah bantuan orang terdekat Anda. Dengan kelembutan dan kasih sayangnya, Anda akan terbantu menemukan diri Anda yang sebenarnya. Sekaligus menemukan akun palsu.

Pasanglah aplikasi anti-irus terbaik pada diri Anda. Dekatkanlah diri kepada Yang Maha Kuasa. Agar terlindungi dari akun palsu yang ada dalam diri Anda. Juga agar mampu terhindar dari godaan akun palsu yang ada pada orang lain.

Yakinlah, pada dasarnya akun asli tetap akan lebih baik dari akun palsu. Maka, jagalah, rawatlah, dan cintailah akun asli Anda, pasangan Anda, keluarga Anda, dan orang-orang di sekeliling Anda.



Tempat Sampah

*Kang punten ya, disini itu bukan tempat sampah.
Ini adalah tempat kerja...*

Ini adalah kali kedua saya berkunjung ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Gunung Santri, Kepuh, Palimanan. Siang itu saya terhenyak. Ada yang tak biasa. Tapi, saya bersyukur. Senang. Dapat pelajaran berharga.

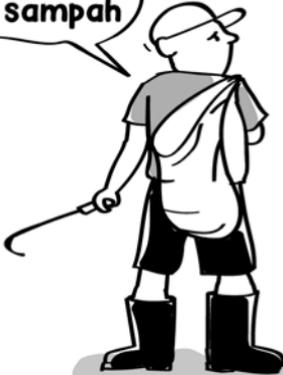
Saya menghampiri empat orang yang sedang memilah sampah. Sepertinya pemu-

lung. Mereka sigap memainkan besi panjang yang ujungnya melengkung runcing bak mata pancing, mengambil dan memisahkan sampah plastik.

Mulanya saya ingin berbin-cang seputar pemilahan sampah. Namun, belum selesai saya bicara, salah satu dari mereka nyeletuk. “Kang punten ya, disini itu bukan tempat sampah. Ini adalah tempat ker-



Ini tempat
kerja bukan
tempat sampah



Kamu yang kerja
di Gedung jangan
sampai jadi sampah





ja," ujarnya.

Saya terpaku beberapa saat. Sebuah sudut pandang yang tak pernah saya pikirkan sebelumnya. Semua orang juga tahu, dan sudah menjadi pengetahuan umum, kalau TPAS itu ya tempat sampah.

"Memang ini tumpukan sampah Kang, tapi ini tempat kerja buat kami. Jadi kami ini juga bukan sampah Kang, kami kerja," sambungnya lagi. Saya pun mendengarkan mereka dengan seksama. Saya rekam betul.

Sudut pandang para pemulung ini menarik. Berbeda. Cukup mengusik. Bisa jadi mereka inilah pejuang lingkungan yang sebenarnya. Pahlawan keluar-ga yang sesungguhnya. Pekerja sejati.

Mereka inilah manusia bersih, meski bekerja di tempat sampah. Dari proses pekerjaan yang saya lihat, insyaallah penghasilan mereka halal. Bahkan punya nilai ibadah lebih. Bukan sekadar

memberi nafkah keluarga, tapi juga menyelamatkan lingkungan dari plastik, atau bahan lain yang tidak mudah terurai.

Saya menangkap sebuah ironi. Tempat sampah, bagi mereka, adalah tempat kerja. Karena itulah mereka sungguh-sungguh bekerja. Sementara, di tempat lain, yang bersih, nyaman, bahkan ber-AC, justru tidak sungguh-sungguh bekerja.

Tempat bergengsi, yang mereka sebut kantor itu, justru menjadi tempat santai, bermalas-malasan. Banyak kasus, terutama di instansi pemerintahan, yang makan gaji buta, atau mungkin setengah buta.

Berangkat pagi, isi presensi, *finger print* atau apalah namanya. Canggih alatnya. Setelah itu, me-reka keluar kantor. Tugas katanya. Padahal Cuma jalan-jalan di mall. Yang bernasib apes, ketangkap satpol PP. Terjaring operasi disiplin.

Bahkan, di tempat lain, ada yang berkarpet tebal, super nyaman lah pokoknya, justru menjadi tempat praktik-praktik kotor. Pungli, pat-gulipat, hingga praktik merugikan uang negara. Miliaran, bahkan triliunan.

Lantas, pertanyaannya: mana yang tempat sampah, dan mana tempat kerja? Siapa yang (maaf) manusia sampah, dan siapa pekerja sejati?

Secara fisik bisa jadi nyaman, ber AC, dengan perkasas super mahal dan canggih, kalau berisi manusia-manusia senantiasa melanggar hukum dan norma, masihkah layak disebut kantor? Jika tempat itu diisi (maaf) manusia sampah, masihkah tepat disebut kantor? Apa justru lebih pas disebut tempat sampah saja?

Entahlah. Silakan renungkan saja. Pasti banyak yang menyangkal. Alasannya: "Tidak bisa begitu, tidak bisa digeneralisasi. Tergantung

orangnya, dst." Jadi menurut saya pertanyaan itu tak perlu dijawab, cukup direnungkan saja. Introspeksi diri.

Saya cuma ingin menegaskan bahwa para pemulung di TPAS itulah pekerja sejati. Secara kasat mata berada di tempat sampah, tapi mereka benar-benar bekerja di tempat kerja. Sekilas secara fisik kotor, tapi sejatinya mereka manusia bersih. Jauh dari korupsi.

Terakhir marilah kita bertanya pada diri sendiri layakkah tempat kerja kita disebut kantor? Atau justru lebih pas disebut (maaf) tempat sampah? Kalau masih banyak praktik kotor di dalamnya, mari mulai kita bersihkan dan jangan bermalas-malasan. Sehingga kantor itu berfungsi sebagai kantor, bukan praktik kotor.



Ujian Gotong Royong

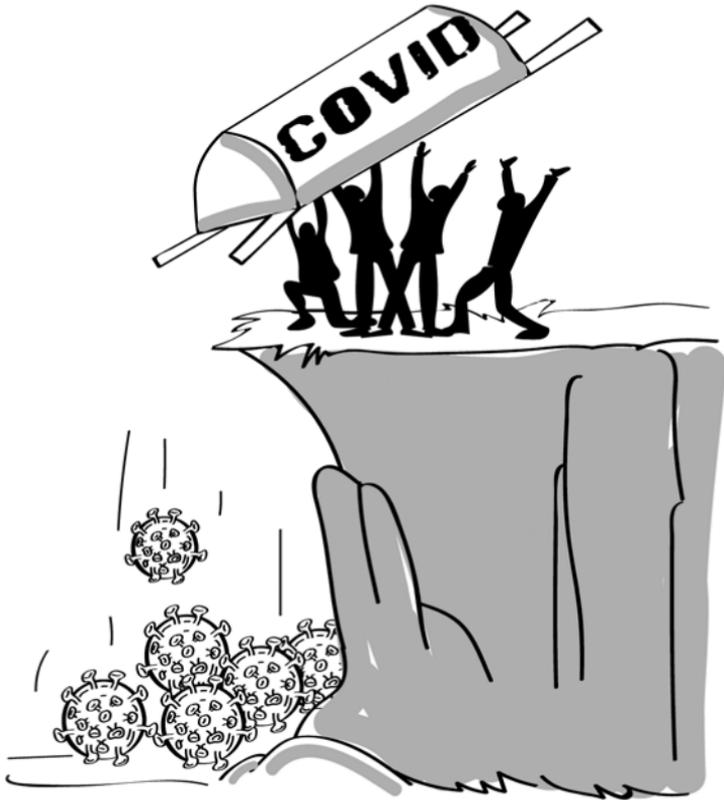
...pandemi ini sebenarnya merupakan ujian gotong royong...

Notifikasi di WhatsApp Group terus tak berhenti, bersahutan. Penasaran? Gerakan kepedulian melawan covid-19 berseliweran. Sepertinya tidak ada komando, tidak ada yang menyuruh. Hanya bermodal kesadaran dan gerak hati.

Mulai dari penggalangan dana, alat pelindung diri (APD), disinfektan, hingga

sembako mereka kumpulkan. Tujuan mereka membantu tenaga medis, keluarga korban, hingga pencegahan penye-baran.

Hari-hari berlalu. Sebaran covid-19 semakin meluas. Korban semakin banyak. Dampak ekonomi tak ter-hindarkan. Kebutuhan dasar hidup (pangan) masyarakat terganggu. Gerakan gotong



**Ayo bareng-bareng
buang penyakit,
aja seneng-seneng
dewek bae**



Mohamad Luthfi

royong pun makin luas.

Bukan lagi sekadar ajakan mengumpulkan bantuan, seruan gotong royong pun bertambah: lihat lah tetangga sekitarmu, dan bantulah jika mereka membutuhkan.

Saya pun menyambutnya dengan semangat dan senyum. Tak lupa turut merespon ajakan kepedulian tersebut. Luar biasa. Inilah Indonesia. Punya gotong royong.

Meski demikian, pandemi ini sebenarnya merupakan ujian gotong royong. Bukan hanya dalam bentuk kepedulian untuk saling membantu, tapi juga menjalankan tugas sesuai perannya.

Bagi masyarakat umum, beraktivitas dari rumah saja itu gotong royong. Memakai masker, hidup bersih, tidak berkerumun itu juga gotong royong.

Bagi korban dan masyarakat yang terdampak secara ekonomi, tidak menyerobot dan berebut bantuan

adalah gotong royong. Jika menyerobot, maka ia telah merampas jatah korban lain yang juga sangat membutuhkan. Jiwa gotong royongnya dipertanyakan.

Apalagi, jika penerima bantuan itu sebenarnya masih tergolong mampu. Bukan orang yang terdampak secara ekonomi akibat covid-19. Semoga berbagai macam bantuan tersebut, baik dari pemerintah, swasta, maupun perorangan, tidak mengikis jiwa gotong royong mereka. Semoga tidak mengubah kebiasaan tangan di atas menjadi tangan di bawah.

Bagi yang bertugas menyalurkan bantuan, baik pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, hingga pusat, menjalankan tugas dengan baik adalah gotong royong. Jika bersantai, apalagi menyalahgunakan bantuan, itu pengkhianatan. Berkhianat terhadap jiwa gotong royong, dan terhadap mereka yang

telah bergotong royong.

Saya masih menyaksikan, di tengah kunjungan kerja, ada masyarakat yang berebut, tidak disiplin, bahkan memanipulasi bantuan. Prihatin, sedih, dan jengkel bercampur.

Namun, yang tak kalah menjengkelkan adalah menyaksikan petugas yang bersantai, saat masyarakat berharap layanan cepat belum mengambil peran maksimal.

Bahkan, cenderung tak acuh. Seolah tidak ada asa untuk segera membantu, mencairkan bantuan. Benar-benar *bikin senewen*. Ia tak paham, jika bekerja dengan baik adalah bagian dari gotong royong.

Gotong royong adalah perkawinan dua sila Pancasila: persatuan (sila ketiga) dan solidaritas sosial (sila ke-5). Jika hari-hari sekarang kita menyaksikan masyarakat yang tidak disiplin atau saling berebut, maka itu ujian gotong royong. Ujian bagi

Pancasila.

Jika kita menyaksikan pemerintah atau petugas negara yang mengambil kebijakan jauh dari kepedulian dan perlindungan terhadap rakyat, maka pondasi dan pilar negara sedang diuji. Gotong royong, Pancasila, dan penegakan Pancasila sedang diuji.

Mampukah kita melewati ujian gotong royong ini? Harus optimistis: mampu! Caranya? Mudah: cukup bergotong royong sesuai perannya. Itu saja.



Kopi Pagi

Kang Luthfi

Kopi Pagi Kang Luthfi ini merupakan curahan pemikiran yang gurih, renyah, dan mencerahkan, dari seorang ketua DPRD.

Pemikiran yang lahir dari keprihatinan atas berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Bak kopi, sesuatu yang pahit itu (masalah) diracik, kemudian disuguhkan solusi-solusi inspiratif (menjadi secangkir kopi yang nikmat dan menyegarkan).

Membaca satu tulisan ke tulisan yang lain seperti halnya memasuki sebuah negeri yang meyakini dan menganut nilai adiluhung, namun pada kenyataannya penuh karut marut persoalan yang tak tertangani. Gambaran ini bukanlah Negeri Empal Gentong yang diilustrasikan Kang Luthfi.

Cirebon
katon

Edisi khusus



DipaTera